

**PENGARUH KEBIJAKAN *U-TURN POLICY* SWEDIA
TERHADAP INSTABILITAS KAWASAN DI EROPA
(TAHUN 2016-2020)**



SKRIPSI

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

DAHLIA

4516023002

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini:

Judul : **Upaya China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Dalam Membangun Konektivitas Regional di Kawasan Asia Selatan**

Nama Mahasiswa : **Nurul Afiat Dwi Putri Tasarane**

Nomor Stambuk : **4516023010**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.


Makassar, 24 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulkhair Burhan, S.IP., MA
NIDN. 0903048101

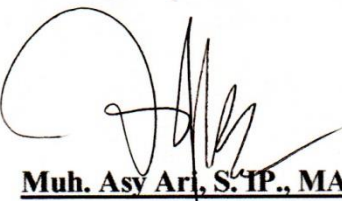

Arief Wicaksono, S.IP., M.A
NIDN. 0927117602

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional


Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si.
NIDN. 0905107005


Muh. Asy Ari, S. IP., MA.
NIDN. 0908088801

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Judul Skripsi **Upaya CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR (CPEC) dalam Membangun Konektivitas Regional di Kawasan Asia Selatan**

Nama Mahasiswa : **Nurul Afiat Dwi Putri Tasarane**

Nomor Stambuk : **4516023010**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Makassar, 24 Agustus 2023

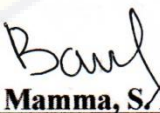
Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si.

Panitia Ujian:


Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.

Ketua


Beche BT Mamma, S. IP., M. A.

Sekretaris

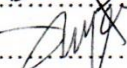
Tim Penguji:

1. Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.
2. Arief Wicaksono, S. IP., M. A.
3. Beche BT Mamma, S. IP., M. A.
4. Ayu Kartika J.T., S. IP., M. A.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dahlia
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh Kebijakan *U-Turn Policy* Swedia Terhadap Instabilitas Kawasan di Eropa (2016-2020)

Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik Sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penelitian ini terbukti merupakn duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 13 Oktober 2023

Penulis



Dahlia

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kebijakan U-Turn Policy Swedia Terhadap Instabilitas Kawasan Eropa”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Dengan kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Muh. Asy Ari, S.IP., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Bapak Arief Wicaksono, S.IP, M.A dan bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan masukan selama pengerjaan skripsi.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Teman-teman penulis Afiat, Regita, Sinta, dan Adriani, yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi.

6. Andi Rosmini, Andi Ratna, Andi Ramiluddin dan Andi Ramli yang adalah tante dan om dari penulis. Atas bantuan dan dukungan mereka lah penulis bisa sampai sejauh ini.
7. Vikky Indah dan Retno Widya selaku sepupu penulis yang selalu ada di saat penulis membutuhkan dukungan.

Ucapan terima kasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta, **Andi Rasnida**, serta Kakek, **Andi Dachlan**, dan Nenek, **Andi Bau**, atas kasih sayang dan cintanya dalam membesarkan serta mendidik penulis hingga saat ini. Juga atas jerih payah mereka dalam bekerja dan berdoa untuk menyekolahkan penulis. Juga untuk Adik ku **Halim**, serta keponakan-keponakanku, **Noora, Syakila, Zahira, Akbar, Azam, Aisyah, Danisah, dan Alesha**, yang telah memberi penghiburan bagi penulis di kala suntuk.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengharapakan skripsi ini berguna bagi setiap pembaca.

Terima Kasih

Penulis

Dahlia

ABSTRAK

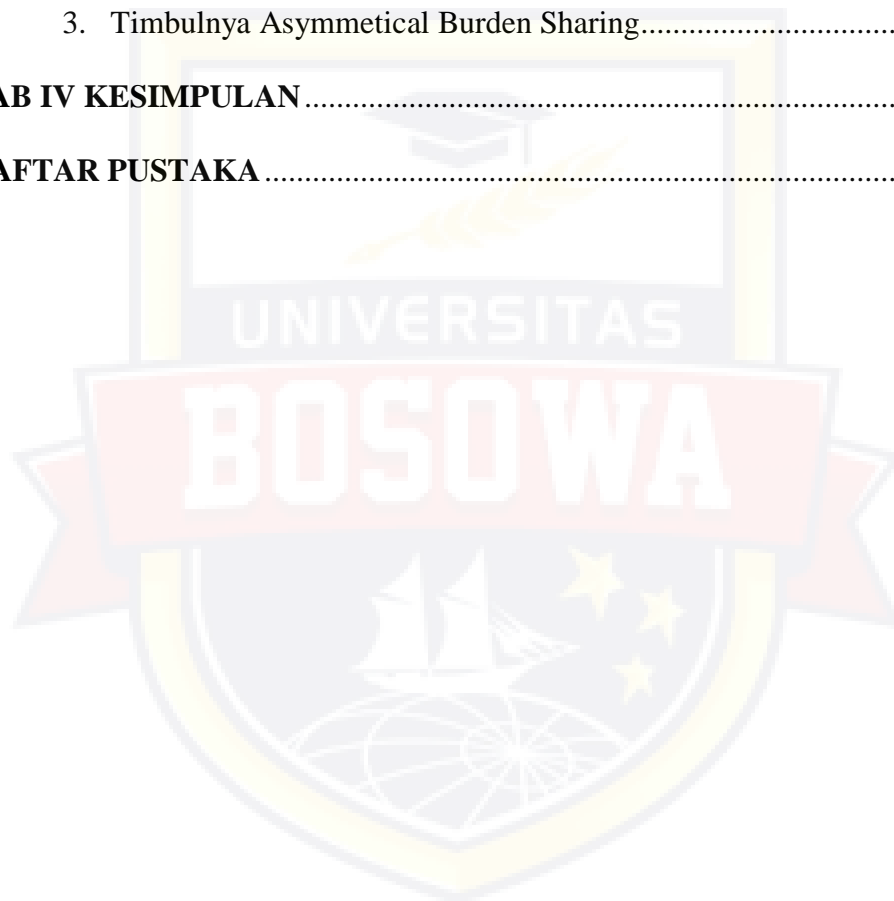
Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh kebijakan *U-Turn Policy* Swedia terhadap instabilitas kawasan di Eropa (tahun 2016-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran literatur yaitu jurnal, skripsi, hasil penelitian terdahulu, artikel, media berita dan sumber lain yang relevan. dan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada data yang tidak sistematis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Swedia, *U-Turn Policy* berhasil memberikan efek yang baik dalam pengurangan anggaran tahunan pemerintah Swedia. Namun, kebijakan *U-Turn Policy* juga menimbulkan perdebatan bagi para anti pengungsi dan pendukung pengungsi. Untuk stabilitas kawasan Eropa sendiri, akibat kebijakan *U-Turn Policy*, kuota pengungsi ke Swedia terpaksa dialihkan ke negara lain. Bagi Swedia, kebijakan *U-Turn Policy* berhasil memberikan efek yang baik dalam pengurangan anggaran tahunan pemerintah Swedia. Dan untuk Eropa, karena kebijakan *U-Turn Policy*, kuota pengungsi Swedia harus diserahkan ke negara lain. Hal ini menimbulkan kecemburuan karena ada perasaan diperlakukan tidak adil dari pembagian kuota ini.

Kata Kunci : *U-Turn Policy*, Swedia, Eropa, Kebijakan, Stabilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Konseptual	10
F. Tipe Penelitian	13
G. Rancangan Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM	16
A. Sejarah Kebijakan U – turn Policy.....	16
B. Krisis Pengungsi 2015.....	29
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Pengaruh <i>U – turn Policy</i> untuk Keamanan Swedia	31

1. Pengaruh dari Segi Ekonomi.....	31
2. Pengaruh dari segi Politik	33
B. Pengaruh <i>U – turn Policy</i> untuk Stabilitas Keamanan Kawasan Eropa	36
1. Memaksa Uni Eropa untuk Mencari Partner Kerja.....	36
2. Sehengen System Menjadi Kacau.....	41
3. Timbulnya Asymmetrical Burden Sharing.....	46
BAB IV KESIMPULAN	56
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Negara yang Mencari Suaka ke Swedia	26
Tabel 3.2 Persebaran Pengungsi di Seluruh Dunia	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pengungsi yang ada di Swedia 2000 – 2021	23
Gambar 3.2	Perbandingan Warga Negara Swedia dan Pengungsi yang Bekerja dan Tidak Bekerja	24
Gambar 3.3	Data Pengungsi ke Eropa	29
Gambar 4.1	Angka Pengungsi di Swedia	31
Gambar 4.2	Alokasi Budget Swedia untuk Pengungsi	32
Gambar 4.3	Penurunan Alokasi Budget Swedia untuk Pengungsi 2016 – 2019	33
Gambar 4.4	Opini Publik Swedia Terkait Isu Pengungsi	34
Gambar 4.5	Gelombang Masuk Pengungsi ke Eropa Melalui Perbatasan Laut	39
Gambar 4.6	Peta Negara Anggota Schengen System	41
Gambar 4.7	Grafik Isu di Eropa	42
Gambar 4.8	Serangan Terorisme di Eropa	45
Gambar 4.9	Gelombang Pengungsi di Swedia 2018 – 2021	50
Gambar 4.10	Perbandingan Pengungsi di Eropa pada 2019 dan 2020	53
Gambar 4.11	Negara – negara Penerima Pengungsi Tertinggi di Dunia	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pengungsi masih menjadi isu krusial di Benua Eropa. Gelombang pengungsi di Eropa diperkirakan dimulai pada awal PD II (Perang Dunia II) di mana saat itu Jerman tengah gencarnya menyebarkan paham Nazisme sehingga menyebabkan jutaan orang Yahudi terpaksa mengungsi ke negara – negara lain di Eropa. Kemudian, gelombang lainnya diteruskan pasca Perang Vietnam dan pecahnya Uni Soviet pada 1989. Puncak angka pengungsi di Eropa ada di saat konflik – konflik pecah yang melibatkan wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Irak, Afganistan dan lain – lain. (Safitri, 2017)

Dikarenakan membludaknya angka pengungsi ini menyebabkan beberapa negara di Eropa Timur dan Tengah protes bahwa negara mereka tidak mampu lagi menampung pengungsi yang terlalu banyak. Menurut IOM (*International Organization for Migration*), tercatat pada tahun 2015, jumlah pengungsi yang datang ke Eropa mencapai angka 750.000 jiwa yang berlangsung hanya pada Januari hingga November 2015, sementara pada tahun 2014, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mencatat total pengungsi yang datang ke Eropa mencapai pada angka 280.000 jiwa. Melihat data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pengungsi yang signifikan, sehingga data pada tahun 2015 menunjukkan telah terjadi krisis pengungsi yang paling besar di Eropa. (Herindrasti, 2021)

Membludaknya angka pengungsi ini kerap menimbulkan resiko stabilitas keamanan Eropa. Terdapat dua resiko yang harus ditanggung oleh Eropa, yakni rentannya aksi terorisme dan polarisasi pandangan politik. Gelombang pengungsi menyebabkan aksi terorisme semakin mudah masuk ke Eropa. Dengan semakin longgarnya kebijakan akan pengungsi maka semakin mudah aksi terorisme masuk. Hal ini pun dibuktikan oleh temuan Europol (*the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation*) yang menangkap 687 pelaku terorisme yang menyamar menjadi pengungsi. (Europol, 2017)

Para pelaku ini diyakini bekerja sama dengan organisasi terorisme di luar Eropa. Sentimen terorisme dan pengungsi semakin menguat di tahun 2013 di mana telah terjadi 20 serangan terorisme di berbagai negara Eropa seperti Belgia, Denmark, Prancis dan lain – lain. (Roynanda, 2019)

Resiko kedua ialah polarisasi pandangan politik di mana isu pengungsi digunakan oleh oposisi sebagai senjata untuk melawan pemerintah. Bahkan isu ini pun dimanfaatkan dalam debat pemilu sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengurus gelombang pengungsi. Adanya polarisasi ini menyebabkan urusan internal negara – negara Eropa terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu yang mendukung serta menolak pengungsi. (Mike Berry, 2015)

Akan tetapi, negara – negara Eropa tidak bisa lepas tangan begitu saja dari isu pengungsi ini. Pada 2015, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pengungsi yang disebut *Council Decision 1523* di mana kebijakan ini berfokus pada membagi rata beban pengungsi ke seluruh negara anggota Uni Eropa

sesuai dengan kemampuan dan kemakmuran negara tersebut. Dan, jika negara tersebut berani menolak maka akan dikenai sanksi sebesar 250.000 Euro. (Benkova, 2017)

Akan tetapi, kebijakan ini pun gagal dikarenakan beberapa negara yang memikul beban pengungsi merasa sudah tidak mampu lagi menerima pengungsi. Salah satunya datang dari Austria yang dipaksa menerima 160.000 jiwa pengungsi. Bahkan negara seperti Hungaria, Republik Ceko, Rumania dan Slovakia yang terpaksa menerima 120.000 jiwa pun merasa bahwa kebijakan ini semakin menambah beban negara. (Hariati, 2017) Keadaan diperparah ketika Swedia malah mengeluarkan *U – turn Policy*.

U – turn Policy jelas menimbulkan ketegangan di antara negara – negara Uni Eropa dikarenakan perubahan sikap Swedia ini tidak diprediksi sebelumnya. Selama ini, Swedia menampilkan sikap yang sangat terbuka terhadap pengungsi. Swedia menjadi salah satu destinasi utama pengungsi di mana Swedia telah menerima 163.000 pengungsi sejak pecahnya konflik – konflik di wilayah Timur Tengah. (Parusel, 2016)

Bisa dikatakan bahwa Swedia menjadi salah satu negara harapan yang bisa mengeluarkan Eropa dari krisis pengungsi sehingga ketika *U – turn Policy* dikeluarkan pada November 2015 bersamaan dengan penolakan *Council Decision 1523* dianggap menambah masalah baru untuk stabilitas keamanan Eropa. *U – turn Policy* merupakan kebijakan pengungsi yang berfokus pada penerimaan pengungsi yang jauh lebih ketat dan tegas. Melalui kebijakan ini, Swedia mengurangi jumlah pengungsi secara drastis bahkan

pengungsi yang berhasil masuk ke Swedia pun hanya akan tinggal sementara. (Parusel, 2016)

Adanya *U – turn Policy* ini jelas menguncang stabilitas keamanan Eropa di mana Uni Eropa harus menampung beban baru dari adanya kebijakan ini. Swedia akan secara keras mengurangi jumlah pengungsi yang masuk dan negara lain yang harus menanggung sisa pengungsi yang ditolak oleh Eropa. Hal ini jelas menyalahi prinsip *Council Decision 1523* yang ingin membagi rata semua beban ke seluruh negara anggota Uni Eropa. (Parusel, 2016)

Sikap Swedia ini secara langsung akan membuat jumlah pengungsi akan terkonsentrasi ke negara – negara tertentu. Satu atau dua negara akan menampung jumlah pengungsi yang jauh lebih besar dari negara yang lain. Dan, hal ini tentu saja akan mempengaruhi solidaritas negara anggota Uni Eropa.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih memudahkan pembahasan ini, penulis hanya berfokus pada arah kebijakan baru pemerintah Swedia terhadap krisis pengungsi yaitu *U-turn Policy*, dimana penulis akan menganalisis pengaruh dari kebijakan *U-turn Policy* pada tahun 2016-2020. Dengan tersebut agar penelitian ini terarah.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kebijakan *U-turn Policy* Swedia terhadap Stabilitas Kawasan di Eropa Tahun 2016-2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana arah kebijakan *U-turn Policy* Swedia terhadap instabilitas Kawasan di Eropa tahun 2016-2020.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari kebijakan *U-turn Policy* yang diterapkan oleh pemerintah Swedia terhadap instabilitas Kawasan di Eropa pada tahun 2016-2020.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Memberi kontribusi pengetahuan dan dapat meningkatkan pemahaman, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam isu krisis pengungsi.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi dan referensi bagi Pelajar Ilmu Hubungan Internasional terkait isu kebijakan luar negeri, dalam hal ini kebijakan dalam menangani krisis pengungsi di Swedia.
- c. Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Makassar.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa literatur untuk memperkaya penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian

pertama berupa skripsi yang dikerjakan oleh Dita Hikmawati dari Universitas Nasional dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Swedia terhadap Imigran di Eropa pada tahun 2015 – 2019”. Penelitian tersebut memaparkan bahwasanya lonjakan kenaikan jumlah di tahun 2015 berhasil membuat keresahan untuk negara – negara Uni Eropa termasuk Swedia. Pada saat itu, terdapat 1,25 juta pengungsi yang mulai masuk ke Eropa melalui jalur Laut Mediterania. Hal ini sama sekali tidak diprediksi oleh Swedia. Swedia yang dahulunya menerapkan kebijakan luar negeri, yakni *Open Door Policy* mulai beralih menjadi *U – turn Policy*. (Hikmawati, 2022)

Open Door Policy sendiri merupakan kebijakan yang diusung oleh Swedia di mana Swedia membuka pintu untuk kedatangan pengungsi. Ketika *U – turn Policy* mulai diberlakukan yang mana kebijakan ini secara tegas membatasi kedatangan pengungsi jelas membuat Uni Eropa kewalahan dikarenakan perubahan kebijakan Swedia ini sama sekali tidak diantisipasi. *U – turn Policy* membatasi segala hak dan fasilitas yang diberikan untuk pengungsi. Para pengungsi tidak bisa lagi menetap dan bekerja di Swedia melainkan harus meninggalkan negara tersebut hingga waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kendaraan pengangkut pengungsi seperti bus dan kapal feri sudah tidak diperbolehkan membawa pengungsi yang tidak memiliki identitas. (Hikmawati, 2022)

Adapun alasan Swedia mengubah kebijakan luar negerinya dari *Open Door Policy* menjadi *U – turn Policy* dikarenakan tiga hal, yaitu (1) meningkatnya jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk pengungsi, (2)

kurangnya kontribusi pengungsi untuk pemasukan negara serta (3) isu pengungsi dijadikan senjata oleh partai oposisi untuk melawan negara. Perbedaan penelitian milik Dita Hikmawati dengan milik penulis terletak pada subjek yang ingin diteliti. Penelitian tersebut lebih meneliti pada perubahan kebijakan luar negeri Swedia dalam merespon isu pengungsi Eropa. Sementara penulis lebih berfokus pada pengaruh dengan *U – turn Policy* untuk stabilitas keamanan Eropa terkait isu pengungsi.

Penelitian kedua berupa laporan penelitian kemitraan dosen dengan mahasiswa yang dilakukan oleh Sugito, S.IP. M.Si dan Dra. Mutia Hariati H, M.Si dengan judul “*Penolakan Negara – negara Uni Eropa terhadap Kebijakan Kuota Pengungsi*” yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini, krisis pengungsi sebenarnya telah dimulai dari tahun 2014 di mana pada saat itu jumlah pengungsi yang ingin memasuki perbatasan Eropa mulai menunjukkan peningkatan. Pada saat itu, jumlah pengungsi naik satu setengah kali lipat dari 2013 yang kemudian naik 5 kali lipat yang awalnya berjumlah 216.300 pengungsi di tahun 2014 menjadi lebih dari 1 juta pengungsi pada 2015. Hal ini dikarenakan konflik yang berkepanjangan yang disertai ketidakstabilan politik yang berlangsung di Suriah, Afganistan, Irak, Libya serta beberapa negara di Timur Tengah. (Hariati, 2017)

Tingginya angka pengungsi di tahun 2015 menyebabkan kekhawatiran untuk negara anggota Uni Eropa dikarenakan Uni Eropa sama sekali tidak mengantisipasi bahwa kenaikan jumlah pengungsi dari 2014 – 2015 akan

semasih ini. Negara Uni Eropa seperti Hungaria, Yunani serta Italia yang wilayahnya kerap dijadikan pintu masuk pengungsi mulai menyatakan keberatan terhadap lonjakan pengungsi ini. Untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, Uni Eropa pun mengeluarkan kebijakan *Council Decision* pada 2015 di mana kebijakan ini bermaksud untuk membagi rata kuota pengungsi ke seluruh negara anggota Uni Eropa sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kemampuan ekonomi negara tersebut. Kebijakan ini juga memberikan sanksi berupa denda untuk negara – negara anggota yang menolak pengungsi. (Hariati, 2017)

Akan tetapi kebijakan ini justru ditolak oleh negara anggota. Penolakan ini datang dari negara – negara Uni Eropa yang berada di bagian timur yang tergabung dalam Visegard Group. Visegard Group sendiri dari Hungaria, Polandia, Republik Ceko dan Slovakia. Menurut mereka, kebijakan ini bukan menjadi jalan keluar dari krisis pengungsi melainkan beban baru untuk negara Visegard Group dikarenakan negara mereka harus menanggung beban 120.000 pengungsi akibat adanya kebijakan ini. Penolakan ini muncul dikarenakan faktor politik domestik di mana lagi – lagi isu pengungsi ini dijadikan senjata oleh oposisi untuk mengkritik pemerintah. Oposisi menggunakan isu pengungsi untuk menyebarkan sentiment anti Islam sehingga menyebabkan pro dan kontra di dalam negeri. (Hariati, 2017)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan milik penulis ialah penelitian ini menitikberatkan pada penolakan negara – negara Uni Eropa terhadap kebijakan *Council Decision* yang ingin diterapkan oleh Uni Eropa untuk

menangani isu pengungsi, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana Swedia yang notabene sebagai salah satu negara Uni Eropa menerap *U – turn Policy* untuk merespon isu pengungsi di mana kebijakan luar negeri ini berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan Eropa. (Hariati, 2017)

Penelitian selanjutnya datang dari Valentina Ranaldi dengan judul “*Refugees and National Security in the European Continent : Individual and Integrated Strategies*” dari *University of Rome*. Penelitian ini menjabarkan bahwa melonjaknya gelombang pengungsi di tahun 2015 juga mengganggu keamanan nasional di kawasan Eropa. Menurut penelitian ini, kawasan Eropa harus mengalami tiga dampak akibat krisis pengungsi yang terjadi di tahun 2015 ialah dampak secara ekonomi, politik dan sosiologi. (Ranaldi, 2016)

Dampak secara ekonomi terlihat dari banyaknya alokasi dana yang harus dipersiapkan pemerintah negara Uni Eropa untuk memberdayakan para pengungsi. Para pengungsi ini tidak memiliki pekerjaan, tempat tinggal bahkan sebagian besar dari pengungsi tidak bisa berbahasa asli negara tersebut. Dampak secara politik tentu saja terlihat dari adanya polarisasi pandangan di mana ketika sebuah negara menerima pengungsi maka hal ini akan dijadikan senjata untuk mengkritik pemerintah sehingga menyebabkan pro dan kontra di dalam negeri. Dampak terakhir dirasakan secara sosiologi di mana akan terdapat ketegangan antara masyarakat asli negara tersebut dengan pengungsi. Tidak semua masyarakat akan menerima dan berhasil bergaul dengan pengungsi tersebut mengingat pengungsi tidak mampu bicara dalam bahasa nasional negara tersebut. (Ranaldi, 2016)

Penelitian ini dengan milik penulis sama – sama membahas bagaimana gambaran dampak yang diberikan oleh pengungsi terhadap keamanan kawasan Eropa, akan tetapi penelitian penulis jauh lebih spesifik yang mana berfokus pada pengaruh *U – turn Policy* Swedia terkait stabilitas keamanan Eropa terkait isu pengungsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Concept*)

Kebijakan luar negeri merupakan aspek penting dalam hubungan internasional yang telah mendapatkan perhatian dari para akademisi dan pembuat kebijakan. Hal ini mengacu pada strategi negara untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasionalnya di arena global. Studi kebijakan luar negeri berusaha untuk memahami bagaimana negara berinteraksi satu sama lain dan aktor non-negara dalam sistem internasional. Ini adalah bidang interdisipliner yang mengacu pada berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik hubungan internasional, sejarah, dan ekonomi. (Senadeera, 2023)

Kaum realis berpendapat bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, dan perilaku mereka didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan dan keamanan mereka di arena global. Realisme mendominasi studi kebijakan luar negeri hingga tahun 1970-an ketika para peneliti mulai mempertanyakan asumsi-asumsinya dan mulai mengeksplorasi pendekatan teoritis alternatif. Saat ini, studi tentang kebijakan luar negeri dicirikan oleh pluralitas perspektif dan konsep teoritis. Para akademisi telah mengembangkan berbagai kerangka teori untuk menjelaskan

perilaku negara dalam sistem internasional, seperti liberalisme, konstruktivisme, feminisme, dan postmodernisme. Teori-teori ini memberikan lensa yang dapat digunakan oleh para sarjana untuk menganalisis dan memahami kompleksitas pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. (Senadeera, 2023)

Konsep kebijakan luar negeri juga telah berkembang dari waktu ke waktu, dan saat ini, konsep tersebut menjangkau luas, seperti perdagangan, keamanan energi, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan. Semakin meningkatnya saling ketergantungan dan globalisasi dunia telah membuat kebijakan luar negeri menjadi area studi yang lebih kritis, karena negara harus menavigasi lanskap global yang kompleks dan terus berubah untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional mereka. (Senadeera, 2023)

Kebijakan luar negeri suatu negara berubah sesuai dengan kebutuhan waktu. Dengan demikian, kesinambungan dalam kebijakan luar negeri bukanlah masalah pilihan tetapi kebutuhan. Morgenthau, memandang bahwa semua kebijakan luar negeri cenderung mengkonfirmasi dan merefleksikan pola-pola aktivitas: mempertahankan keseimbangan kekuasaan, imperialisme dan politik prestise. Dengan demikian, Kebijakan Luar Negeri adalah strategi, metode, pedoman, perjanjian yang biasanya digunakan oleh pemerintah nasional untuk melakukan tindakan-tindakannya di arena internasional. (Ahmed, 2020)

Dalam hal ini, Padelford dan Lincoln memandang bahwa "Kebijakan Luar Negeri adalah elemen kunci dalam proses dimana suatu negara

menerjemahkan tujuan dan kepentingannya yang luas ke dalam tindakan konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mempertahankan kepentingannya". Dalam hal ini, Kebijakan Luar Negeri mendefinisikan tujuan-tujuan kepentingan nasional dan berusaha untuk mencapainya melalui pelaksanaan kekuasaan nasional. Melalui kebijakan luar negeri, suatu negara mencoba untuk memenuhi tujuan nasionalnya di arena internasional. Dr, Mohinder Kumar menjelaskan Kebijakan Luar Negeri adalah tindakan yang dipikirkan secara matang untuk mencapai tujuan dalam hubungan luar negeri seperti yang diarahkan oleh ideologi kepentingan nasional. (Ahmed, 2020)

2. Kebijakan U-turn Policy

Penelitian penulis didasarkan pada bagaimana kebijakan *U – turn Policy* yang dikeluarkan Swedia justru mengganggu stabilitas keamanan Eropa terkait melonjaknya isu gelombang pengungsi. Penulis menilai penggunaan *U-turn Policy* sebagai konsep yang mencerminkan kebijakan luar negeri Swedia terhadap arus pengungsi di kawasan Eropa. Penulis akan membagi analisis kebijakan *U – turn Policy* ke dalam dua poin, yakni:

- a. *U – turn Policy* akan penulis gunakan untuk menganalisa bagaimana dampak dari kebijakan ini untuk stabilitas keamanan Swedia yang notabene sebagai aktor yang menerapkan kebijakan ini.
- b. *U – turn Policy* akan penulis gunakan untuk menganalisa bagaimana dampak kebijakan ini untuk stabilitas keamanan Eropa.

Untuk poin kedua, penulis akan memperlihatkan serta membedah bagaimana *U – turn Policy* menjadi “pengganggu” stabilitas keamanan Eropa

dikarenakan kebijakan ini dikeluarkan oleh Swedia bersamaan dengan kegagalan kebijakan pengungsi Uni Eropa, yaitu *Council Decision 1523*.

Adapun kebijakan *U – turn Policy* ini akan penulis hubungkan dengan sekuritisasi. Sekuritisasi sendiri merupakan suatu tindakan yang diambil oleh aktor guna mengatasi isu keamanan di wilayah tertentu. (Pawesthri, 2019) Tindakan sekuritisasi ini memiliki 3 komponen, yakni adanya sebuah ancaman, pengambilan sebuah kebijakan dan eksistensi kebijakan tersebut dalam mempengaruhi hubungan antar unit. (Eroukhmanoff, 2018)

Tiga aspek inilah yang akan penulis teliti di mana penulis akan menjelaskan bagaimana isu gelombang pengungsi yang masuk ke Eropa mulai berubah menjadi ancaman untuk negara – negara Eropa yang kemudian dilanjutkan pada bagaimana akhirnya Swedia mengeluarkan *U – turn Policy* sebagai solusi untuk menanggulangi isu gelombang pengungsi dan terakhir ialah bagaimana *U – turn Policy* mempengaruhi unit stabilitas keamanan Eropa yang juga menghadapi permasalahan yang sama, yakni isu pengungsi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu menggambarkan arah kebijakan pemerintah Swedia terhadap *U-turn Policy* dalam menangani krisis pengungsi yang memberi dampak atau pengaruh dari kebijakan Swedia terhadap hubungan internasional pada tahun 2016-2020.

2. Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yaitu jurnal, skripsi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, media berita dan sumber-sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan Study pustaka (*Library Research*) yaitu, mengumpulkan data dengan cara menelusuri berbagai literature jurnal, buku, skripsi, artikel, maupun berita dari situs internet yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisa yang menekankan pada data non-sistematis, dengan menghubungkan sumber-sumber data yang diperoleh dengan unit analisis melalui konsep yang penulis gunakan.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan disusun dalam karya tulis ilmiah dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

A. Bab I yaitu, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan rancangan sistematika pembahasan.

- B. BAB II yaitu, gambaran umum, berisi tentang kebijakan Pemerintah Swedia terhadap *U-turn Policy* krisis pengungsi.
- C. BAB III yaitu, analisis penelitian yang berisi mengenai pengaruh dari kebijakan pemerintah Swedia *U-turn Policy* dalam krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2016-2020.
- D. BAB IV yaitu, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kebijakan U – turn Policy

U – turn Policy merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Swedia guna menghadapi gelombang krisis pengungsi yang melonjak pada 2015. Kebijakan ini secara resmi diberlakukan pada November 2015 yang diumumkan sendiri secara live oleh Perdana Menteri Swedia saat itu, Stefan Lofven. (Guardian, 2015) Menurut Henrik Emilsson dalam tulisan yang berjudul “Continuity or Change? the Refugee Crisis and the End of Swedish Exceptionalism”, U – turn Policy atau Close Door Policy mengagetkan dunia internasional di mana kehadiran kebijakan ini memaksa terjadinya perubahan kebijakan Uni Eropa. Selama ini, Swedia yang sangat terbuka dengan gelombang pengungsi melalui Open Door Policy dan menjadi salah satu negara harapan Uni Eropa dalam menampung pengungsi. (Emilsson, 2018)

Perubahan kebijakan luar negeri Swedia ini jelas membuat Uni Eropa harus memutar otak untuk mencari jalan keluar dari krisis pengungsi 2015. Kebijakan U – turn Policy ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan Swedia. Kalimat menjaga stabilitas keamanan ini merujuk pada bagaimana pemerintah Swedia nantinya dapat menghadapi sebelum dan sesudah krisis pengungsi 2015. Berdasarkan tulisan ini, terdapat dua inti penting dari kebijakan ini, yakni membatasi jalan masuk menuju Swedia serta

memperlihatkan ke pengungsi bahwa Swedia bukan lagi negara tujuan utama pengungsi. (Emilsson, 2018)

Menurut Anu Kaupmees dalam tulisan yang berjudul “Sweden Struggles With an Influx of Refugees” di mana kebijakan U – turn Policy ini memang memberikan dampak buruk pada citra sebuah negara di mana menolak pengungsi sama saja dengan meniadakan Hak Asasi Manusia (HAM) milik pengungsi. Dan, kenyataan pemerintah Swedia telah melakukan hal tersebut. Kebijakan ini membuat pemerintah Swedia secara tegas akan membatasi kuota masuk pengungsi kemudian pemerintah juga hanya akan memperbolehkan pengungsi untuk masuk dalam rentang waktu tertentu. (Kaupmees, 2015)

Pengungsi – pengungsi ini hanya dapat menetap dan tinggal di Swedia selama memiliki keluarga yang sebelumnya telah tinggal di Swedia dan telah memiliki paspor Swedia. Anu Kaupmees mengatakan bahwa keputusan penggunaan U – turn Policy menjadi keputusan paling bersejarah dalam penanganan pengungsi oleh Swedia. (Kaupmees, 2015)

Meskipun menimbulkan kegemparan dan perubahan kebijakan luar negeri oleh Uni Eropa, akan tetapi kehadiran kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi keamanan di Swedia. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Swedia sangat terbuka terhadap kedatangan pengungsi dikarenakan pemerintah percaya bahwa dengan menerima pengungsi dapat mengatasi masalah aging population. Fenomena aging population merupakan fenomena di mana jumlah penduduk berusia tua lebih banyak daripada

penduduk dalam usia siap kerja. Fenomena ini mengakibatkan negara kesusahan untuk mencari tenaga kerja lokal dikarenakan jumlah usia siap kerja memang tergolong sedikit. (Kaupmees, 2015)

Dan, pemerintah Swedia merasa bahwa jika negara mendatangkan pengungsi, maka pengungsi – pengungsi ini dapat dimanfaatkan menjadi pekerja (labor). Akan tetapi kenyataannya justru pemerintah harus mengeluarkan dana yang jauh lebih besar untuk memberdayakan pengungsi ditambah gelombang pengungsi yang sangat tinggi yang akhirnya memaksa pemerintah memberlakukan U – turn Policy. (Kaupmees, 2015)

Kebijakan ini juga dianggap sebagian besar ahli mencoreng image brand yang selama ini dibangun oleh Swedia. Menurut Tent Patnership for Refugees sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berskala internasional mengungkapkan bahwa kebijakan Open Door Policy yang selama ini diusung oleh Swedia tergolong sangat naif. Swedia mencoba membangun branding sebagai “negara ramah”, “negara yang mencintai multi kultural dan multi etnis” dan lain – lain tanpa memikirkan setiap kemungkinan yang akan datang terjadi kedepannya, salah satunya krisis pengungsi 2015. (Refugees, 2016)

U – turn Policy membuat branding Swedia seketika hancur yang diperparah dengan sikap Swedia yang seakan ingin lepas tangan dengan krisis pengungsi 2015 yang harus ditanggung oleh negara anggota Uni Eropa lainnya. Pemerintah Swedia selain beralasan bahwa U – turn Policy terpaksa digunakan untuk menyelamatkan masalah internal juga mengungkapkan bahwa usaha Uni Eropa untuk mencari jalan keluar terkait isu pengungsi telah

gagal sehingga membuat Swedia terpaksa menggunakan kebijakan luar negeri U – turn Policy. (Ranaldi, 2016)

Terlepas dari banyaknya kekurangan dari penerapan konsep ini untuk Swedia, penggunaan U – turn Policy diharapkan dapat memperbaiki sekuritisasi Swedia. Sekuritisasi sendiri merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh aktor untuk mencari jalan keluar dari ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara. Masalah yang dihadapi oleh negara tersebut telah berubah menjadi sebuah ancaman sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan. Jika dihubungkan dengan kebijakan U – turn Policy, maka akan terlihat bahwasanya isu pengungsi telah menjadi ancaman domestik untuk pemerintah Swedia sehingga memaksa negara memberlakukan perubahan berupa U – turn Policy. Perubahan melalui U – turn Policy ini diharapkan dapat membawa pengaruh untuk stabilitas keamanan yang selama ini telah terancam akibat membludaknya isu pengungsi 2015. Adapun 2 pengaruh yang dirasakan oleh Swedia terhadap stabilitas keamanan dalam negeri, yakni

1. Pengaruh dari segi ekonomi

Penggunaan U – turn Policy sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi Swedia dikarenakan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwasanya Swedia terpaksa mengalokasikan banyak biaya untuk memberdayakan pengungsi.

2. Pengaruh dari segi politik

Penggunaan U – turn Policy diharapkan dapat mengurangi ketegangan dalam negeri khususnya pro dan kontra berkepanjangan akibat Open Door Policy yang dianut oleh Swedia

Selain mencoreng image brand yang selama ini dibangun oleh Swedia, U – turn Policy juga berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan Eropa. U – turn Policy diberlakukan pada November 2015 di mana hal ini hampir bersamaan dengan penolakan kebijakan Uni Eropa, yaitu Council Decision. (Hariati, 2017) Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwasanya beberapa negara anggota Uni Eropa menolak Council Decision yang notabene kebijakan pembagian kuota pengungsi ke seluruh negara anggota Uni Eropa sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kemakmuran negara anggota tersebut. (Salsabila, 2018)

Kebijakan ini ditolak dikarenakan kebijakan ini malah semakin menambah beban negara. Dan, keadaan diperparah ketika Swedia mengeluarkan kebijakan U – turn Policy yang semakin memberatkan beban Uni Eropa. U – turn Policy seolah menjadi jalan untuk Swedia untuk “lepas tangan” dari Uni Eropa. Jika isu pengungsi menjadi ancaman untuk Swedia yang menyebabkan Swedia akhirnya melakukan perubahan melalui U – turn Policy, maka jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka U – turn Policy – lah yang menjadi ancaman untuk keamanan kawasan Eropa. Kebijakan U – turn Policy memaksa Uni Eropa untuk melakukan perubahan agar isu pengungsi tidak berlarut dan berujung menambah masalah baru untuk Uni Eropa. (Pratiwi, 2019)

Sejauh ini, terdapat 3 implikasi utama yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan Eropa akibat dari penerapan U – turn Policy, yakni;

1. U – turn Policy memaksa Uni Eropa untuk mencari partner kerja sama suaka pengungsi

U – turn Policy berfokus pada usaha pemerintah Swedia untuk membatasi jumlah pengungsi yang mana dengan kata lain kuota pengungsi yang harus ditanggung terpaksa harus dibagikan ke negara anggota Uni Eropa lainnya. Dan, dalam masalah ini Jerman menjadi harapan Uni Eropa akan tetapi kenyataan masyarakat Jerman mengadakan protes besar – besaran menolak untuk menambah jumlah pengungsi. Jika keadaan ini dibiarkan terus menerus maka akan mengganggu stabilitas keamanan dari aspek ekonomi, politik dan sosiologi. Kemudian untuk keluar dari masalah ini, Uni Eropa pun mencari partner kerja sama untuk menangani isu pengungsi ini, yakni Turki. (Hariati, 2017)

2. U – turn Policy membuat tata kerja Schengen System menjadi kacau

Schengen System atau Kawasan Schengen merupakan sebuah kawasan yang masuk dalam kawasan bebas visa dan paspor yang telah disetujui oleh 27 negara di dalam Perjanjian Schengen. Dan, Swedia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Schengen. Akibat U – turn Policy, Swedia mengecek kawasan Schengen secara berkala sehingga menimbulkan kesan Swedia tidak mematuhi isi Perjanjian Schengen. Dampaknya pun terlihat dari stabilitas keamanan Eropa yang juga ikut meratifikasi perjanjian ini. (Sergio Carrera, 2019)

3. Terancamnya stabilitas keamanan kawasan dikarenakan timbulnya Asymmetrical Burden Sharing

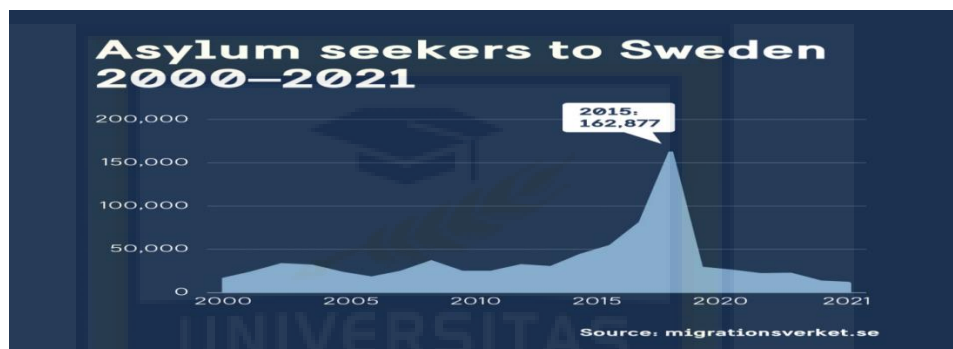
Jika dua implikasi sebelumnya lebih banyak berbicara tentang stabilitas keamanan dari segi kawasan dan teritori, maka implikasi satu ini lebih berfokus pada solidaritas dan hubungan profesional yang dijalin oleh negara anggota Uni Eropa. Asymmetrical Burden Sharing (ABS) merujuk kepada kesetaraan secara adil dari beban yang harus ditanggung oleh negara anggota. ABS ini menimbulkan kecemburuan di antara negara dikarenakan salah satu negara akan merasa menanggung beban lebih banyak dari yang lain (unfortunate states) dan negara yang lain justru mendapatkan jumlah beban yang lebih ringan (fortunate states). Dari adanya kerenggangan inilah yang berdampak secara langsung pada kinerja negara anggota terhadap isu stabilitas keamanan terkait kemunculan U – turn Policy. (Benedikter, 2018)

Selama ini, Swedia dikenal sebagai negara yang sangat terbuka dengan kehadiran pengungsi. Keterbukaan Swedia ini telah dimulai pada PD II (Perang Dunia II). Pada saat itu, orang – orang yang masuk ke Swedia didominasi oleh pekerja yang berasal dari Jerman dan sebagian negara Nordik dan Baltik. Masuknya pengungsi dimulai pada 1980 hingga 1990 – an di mana tujuan masuk ke Swedia mulai berubah. (Sverige, 2022)

Jika dulunya orang yang masuk ke Swedia dengan tujuan bekerja, maka pada rentang tahun ini motif masuk ke Swedia kebanyakan untuk mencari suaka. Pada rentang tahun tersebut, Perang Iran - Irak pecah dan

menyebabkan 7.000 jiwa penduduk Irak serta 27.000 jiwa penduduk Iran terpaksa mengungsi ke Swedia. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh migrasi pengungsi yang dilakukan oleh beberapa negara di Laut Balkan seperti Kosovo dan Bosnia yang juga ikut mencari suaka ke Swedia. (Sverige, 2022)

Gambar 3.1 Pengungsi yang ada di Swedia 2000 - 2021



Sumber : Sweden Immigration (Sverige, 2022)

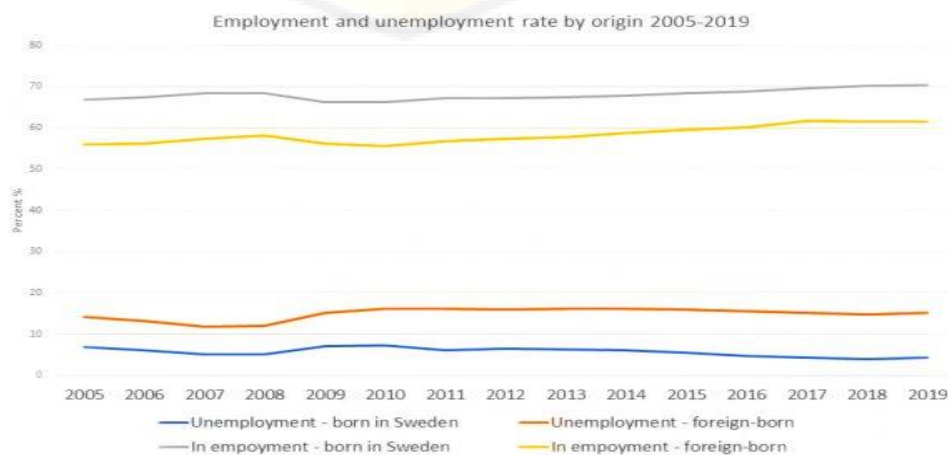
Dapat terlihat dari data di atas di mana secara perlahan jumlah pengungsi yang hendak ke Swedia melejit di tahun 2015. Bisa dikatakan bahwa pada tahun 2015 merupakan puncak masuknya gelombang pengungsi ke Swedia. Pada tahun tersebut, Swedia harus menanggung kurang lebih 162.877 jiwa pengungsi yang terpaksa melakukan imigrasi dikarenakan pecahnya Perang Saudara di Suriah. Selain karena perang di Suriah, konflik di Afganistan dan Irak juga ikut menjadi alasan mengapa gelombang pengungsi yang masuk ke Swedia melonjak pada 2015. Angka 160.000 lebih pengungsi ini menjadikan Swedia sebagai negara Uni Eropa penerima pengungsi terbesar di krisis pengungsi 2015. (Emilsson, 2018)

Kenyataan, pasca lebih dari 160.000 jiwa pengungsi ini masuk ke Swedia, angka pengangguran di Swedia seketika meningkat pesat menjadi

7,1% yang mana pengangguran didominasi oleh para pengungsi. Swedia pun terpaksa menggelontorkan lebih banyak dana untuk memberdaya para pengungsi yang masuk ini. Dana yang dikeluarkan mencapai empat kali lipat dari tahun 2014 yang awalnya US\$ 1 miliar menjadi US\$ 4 miliar di tahun 2015. Swedia menganut *Nordic Welfare System* di mana Swedia memberlakukan pajak yang tinggi untuk warga negaranya. (Salsabila, 2018)

Pajak yang tinggi ini akan digunakan untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan yang nantinya dapat diakses dengan biaya yang rendah. Akan tetapi, akibat krisis pengungsi 2015, Swedia terpaksa mengeluarkan dana lebih yang justru mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan di sana. 58% anggaran yang didapatkan dari pajak warga negara terpaksa dihabiskan untuk membenahi masalah pengungsi ini. Swedia berharap dengan alokasi dana yang besar akan mampu mengurangi angka pengangguran yang kian membesar, akan tetapi justru dari 160.000 lebih pengungsi hanya 500 orang saja yang bisa mendapatkan pekerjaan. (Salsabila, 2018)

Gambar 3.2 Perbandingan Warga Negara Swedia dan Pengungsi yang Bekerja dan Tidak Bekerja



Sumber : Empowering Migrants for Employment (Stenström, 2022)

Berdasarkan data di atas terlihat terdapat perbandingan yang mencolok dari perbandingan warga asli Swedia dan pengungsi. Warga asli Swedia menunjukkan tingkat pengangguran yang cenderung sangat kecil jika dibandingkan dengan pengungsi. Tujuan Swedia mendatangkan pengungsi untuk menangani fenomena *Aging Population* pun gagal. Memang, pengungsi yang masuk berada dalam usia kerja yakni 16 hingga 64 tahun. Akan tetapi kualitas pendidikan pengungsi yang siap kerja ini pun rendah, minim skill, minim pengalaman kerja dan tentu saja tidak bisa berbahasa Swedia. Sehingga lapangan kerja yang didapatkan oleh pengungsi ini juga rendah seperti penjaga kantor, tukang kebun dan lain – lain. (Times, 2017)

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Swedia menerapkan pajak yang tinggi untuk warganya. Pengungsi yang telah bekerja tadi pun tak mampu membayar pajak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga Swedia terpaksa memutar otak untuk mengatasi isu ini. Kondisi Swedia yang seperti yang kemudian digunakan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah. Oposisi di Swedia terbagi menjadi dua kubu besar, yakni Partai Demokrat Swedia (*Sweden Democrat Party*) yang beraliansi dengan Partai Hijau (*Green Party*) serta Partai Moderat yang bergabung dengan Partai Liberal, Partai Tengah dan lain – lain. Meskipun saling berkubu, tetapi kedua kelompok partai ini kerap menyuarakan 1 opini, yakni anti pengungsi. Kubu Partai Moderat kerap menyuarakan pesan anti pengungsi dengan cara yang

cenderung “halus” dan tidak *to the point*. Sementara Partai Demokrat Swedia justru kebalikannya. Kubu ini jauh lebih frontal. (Salsabila, 2018)

Kefrontalan yang diusung oleh Partai Demokrat Swedia ini justru berhasil menjaring suara hingga 20% di pemilu Swedia 2018. Kedua kubu sama – sama menyuarakan opini bahwa mereka tidak ingin menyerang pemerintah dengan isu anti pengungsi ini. Akan tetapi akibat krisis pengungsi 2015, pajak yang seharusnya digunakan kesejahteraan masyarakat justru digunakan untuk membenahi pengungsi. Pemerintah telah gagal menangani isu pengungsi yang kemudian turut mengorbankan identitas nasional, kesejahteraan dan keamanan nasional. Kondisi dalam negeri yang seperti inilah yang akhirnya memaksa pemerintah Swedia menerapkan *U – turn Policy*. (Salsabila, 2018)

Tabel 3.1 Negara yang Mencari Suaka ke Swedia

Negara	Jumlah
Afganistan	1.491
Suriah	1.274
Irak	934
Ukraina	532
Turki	492
Somalia	456
Eritrea	406
Iran	376
<i>Stateless</i>	347

Sumber : Asylum Information Database (AIDA, 2021)

Data di atas menunjukkan bahwa beberapa negara di kawasan Asia Barat masih menjadi penyumbang tertinggi dari melonjaknya krisis pengungsi di Swedia pada 2015. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa di tahun 2015 menjadi puncak dari masuknya pengungsi ke Swedia. Dikarenakan tingginya angka pengungsi pada tahun ini sehingga memaksa pemerintah Swedia memberlakukan *U – turn Policy* pada November 2015. Setelah sebelumnya sangat terbuka dengan masuknya pengungsi, Swedia secara gesit mulai melakukan pembatasan untuk gelombang pengungsi. Perbatasan negara mulai dijaga ketat, pengecekan kartu identitas mulai dilakukan di wilayah perbatasan dengan Denmark yang notabene merupakan jalur keluar – masuk pengungsi dari luar Swedia. (Pratiwi, 2019)

Selain melakukan pengecekan secara ketat, pemerintah Swedia juga mulai memberlakukan ijin tinggal sementara. Dimulai pada November 2015, Undang – undang Swedia khusus pengungsi pun mulai diamandemen di mana Swedia mulai membatasi kuota masuk pengungsi. Pada 4 Januari 2016, pemerintah Swedia mulai menempatkan petugas di seluruh perbatasan yang bertujuan untuk mengantisipasi gelombang pengungsi serta pengungsi yang masuk tanpa izin. Perbatasan dengan Denmark pun menjadi fokus pembatasan Swedia. Swedia menutup perbatasan di bagian selatan yang dapat diakses dengan menggunakan jembatan, jalan raya dan kereta api. (Pratiwi, 2019)

Kemudian, pemerintah selesai mengamandemen RUU Pengungsi pada 20 Juli 2016 yang mana terdapat tiga poin utama dari aturan ini, yakni

- a. Pemerintah Swedia hanya akan memberikan waktu tiga tahun untuk pengungsi yang telah melewati tes wawancara yang diselenggarakan. Dan,

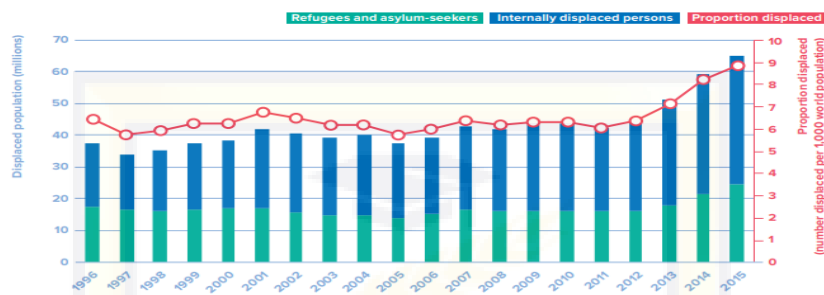
untuk pengungsi yang baru memasuki Swedia hanya diberikan waktu 13 bulan. Para pengungsi dapat memperpanjang izin tinggal dengan syarat dapat membuktikan bahwa mereka mampu dan mandiri untuk membiayai diri sendiri serta membayar dari pekerjaan yang mereka lakukan. (Juliandini, 2021)

- b. Swedia mencabut izin perlindungan untuk pengungsi dan hanya anak – anak dibawah umur yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Jika dulunya, seluruh pengungsi mendapatkan fasilitas dari izin perlindungan maka pasca amandemen, pemerintah tidak akan lagi memberikan fasilitas seperti dahulu. (Juliandini, 2021)
- c. Swedia memperketat aturan reunifikasi keluarga. Di aturan sebelumnya, seorang pengungsi dapat masuk ke Swedia jika memiliki keluarga yang telah dulu memperoleh perlindungan di Swedia. Di amandemen yang baru, pemerintah pun tidak serta merta memberikan izin tersebut. Seorang pengungsi yang ingin melakukan reunifikasi keluarga terlebih dahulu harus melakukan tes. Akibat perubahan ini, dari rentang waktu Januari hingga Juli 2016, telah ada 112 reunifikasi keluarga yang ditolak oleh Swedia. (Juliandini, 2021)

B. Krisis Pengungsi 2015

Krisis pengungsi yang terjadi di tahun 2015 menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Uni Eropa.

Gambar 3.3 Data Pengungsi ke Eropa



Sumber : UNHCR (UNHCR, 2015)

Krisis pada 2015 ini menjadi titik tertinggi gelombang pengungsi yang pernah dicatat oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugees*). Hal ini dibuktikan oleh data di atas di mana lonjakan gelombang pengungsi di mulai pada 2010 – an yang kemudian terus menanjak hingga ke angka tertinggi yakni di tahun 2015. Menurut laporan yang dirilis oleh UNHCR dengan judul “*Global Trends Forced Displacement in 2015*”, terdapat sekitar 12,4 juta jiwa yang terpaksa mencari tempat pengungsian di negara lain akibat konflik, perang saudara ataupun persekusi. Di dalam laporan ini juga memperlihatkan bahwa terdapat hampir 10 juta jiwa yang terpaksa menjadi stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Dari seluruh total pengungsi dunia, 54% nya datang dari 3 negara, yakni Suriah, Afganistan dan Somalia. Suriah menjadi negara penyumbang pengungsi tertinggi yakni sekitar 4,9 juta jiwa yang diikuti oleh Afganistan sebanyak 1,4 juta jiwa dan Somalia 1,1 juta jiwa. (UNHCR, 2015)

Tabel 3.2 Persebaran Pengungsi di Seluruh Dunia

UNHCR regions	Start-2015			End-2015			Change (total)	
	Refugees	People in refugee-like situations	Total refugees	Refugees	People in refugee-like situations	Total refugees	Absolute	%
- Central Africa and Great Lakes	625,000	37,600	662,600	1,173,400	15,900	1,189,300	526,700	79
- East and Horn of Africa	2,568,000	33,400	2,601,400	2,739,400	-	2,739,400	138,000	5
- Southern Africa	177,700	-	177,700	189,800	-	189,800	12,100	7
- West Africa	243,300	-	243,300	295,000	-	295,000	51,700	21
Total Africa*	3,614,000	71,000	3,685,000	4,397,600	15,900	4,413,500	728,500	20
Americas	509,300	259,700	769,000	496,400	250,400	746,800	-22,200	-3
Asia and Pacific	3,615,200	280,100	3,895,300	3,551,900	278,300	3,830,200	-65,100	-2
Europe	3,057,000	18,200	3,075,200	4,362,600	28,800	4,391,400	1,316,200	43
Middle East and North Africa	2,898,500	65,400	2,963,900	2,675,400	64,100	2,739,500	-224,400	-8
Total	13,694,000	694,400	14,388,400	15,483,900	637,500	16,121,400	1,733,000	12

* Excluding North Africa.

Sumber : UNHCR (UNHCR, 2015)

Krisis pengungsi terbesar pada 2015 tidak hanya menjadi isu yang harus ditangani oleh UNHCR melainkan juga Eropa. Eropa terpaksa harus menanggung sekitar 4 juta lebih pengungsi yang datang melalui jalur laut. Ratusan bahkan ribuan pengungsi ini terpaksa menempuh perjalanan berbahaya melalui Laut Mediterania menuju Eropa untuk mencari bantuan suaka. Dapat terlihat dari tabel di atas terlihat bahwasanya Eropa menjadi salah satu tujuan pengungsi di mana Eropa menjadi kawasan nomor dua terbanyak setelah Benua Afrika. (UNHCR, 2015)

Terdapat sekitar 1 juta pengungsi yang berhasil masuk ke Eropa melalui jalur laut. Kebanyakan dari pengungsi ini berasal dari Suriah, Afganistan serta Irak. Sebanyak 800.000 pengungsi Suriah telah masuk ke Eropa pada 2015. Tidak hanya Eropa, kekhawatiran akan krisis pengungsi ini juga dirasakan di belahan dunia yang lain seperti Benua Amerika. Para pengungsi juga mencari di Amerika Tengah seperti di El Salvador, Guatemala dan Honduras di mana pemerintah negara – negara tersebut kerap menggunakan kekerasan untuk mencegah pengungsi masuk. (UNHCR, 2015).

BAB III

PEMBAHASAN

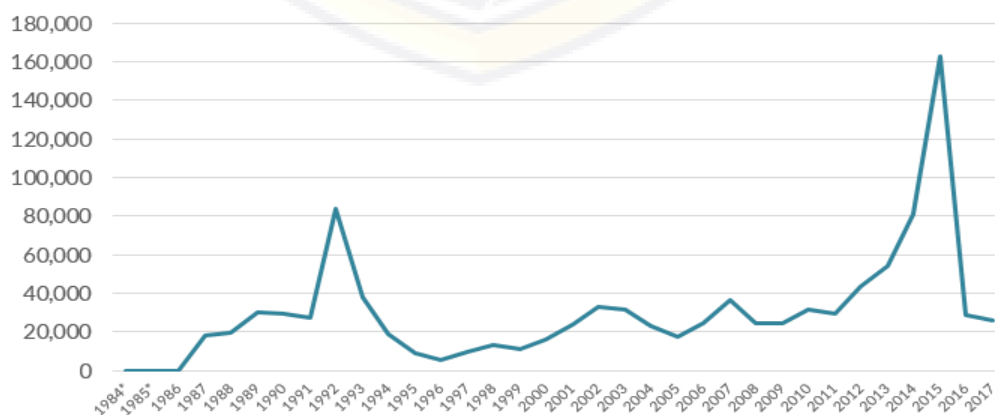
Sesuai dengan konsep yang digunakan di dalam penelitian ini, penulis akan membagi pengaruh adanya *U – turn Policy* menjadi dua sub – bab, antara lain

A. Pengaruh *U – turn Policy* untuk Keamanan Swedia

1. Pengaruh dari Segi Ekonomi

Seperti yang disebutkan di bab sebelumnya bahwasanya penerapan *U – turn Policy* ini dikarenakan Swedia merugi dari segi ekonomi akibat kualitas pengungsi yang tidak sesuai harapan dan kerap menunggak pajak. Selain itu pula, masuknya gelombang pengungsi juga menyebabkan Swedia harus menggelontorkan dana yang cukup banyak sehingga jika keadaan terus menerus dibiarkan maka akan ada kekacauan dari segi pengelolaan dana dalam negeri. Untuk itulah *U – turn Policy* dipersiapkan pemerintah Swedia guna mengatasi hal ini.

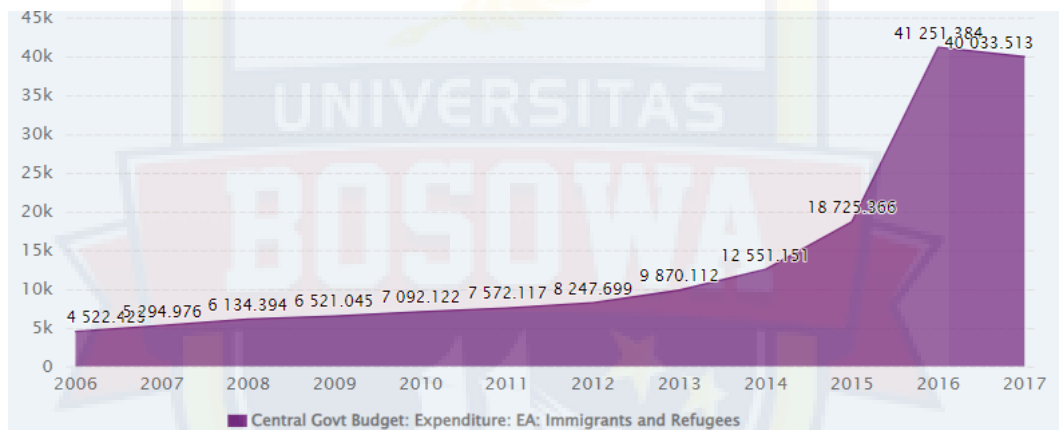
Gambar 4.1 Angka Pengungsi di Swedia



Sumber : Migration Policy Institute (Institute, 2018)

Kebijakan *U – turn Policy* berjalan sesuai dengan harapan pemerintah Swedia di mana dapat terlihat angka pengungsi yang masuk paska kebijakan diberlakukan pada 2016 menurun sangat drastis. Awalnya pengungsi yang masuk ke Swedia lebih dari 150.000 namun dikarenakan pembatasan yang ketat menyebabkan angka pengungsi yang masuk hanya berada di kisaran 20.000 hingga 40.000 pengungsi. Fenomena ini tentu saja sangat berdampak pada performa alokasi budget pemerintah Swedia. (Institute, 2018)

Gambar 4.2 Alokasi Budget Swedia untuk Pengungsi

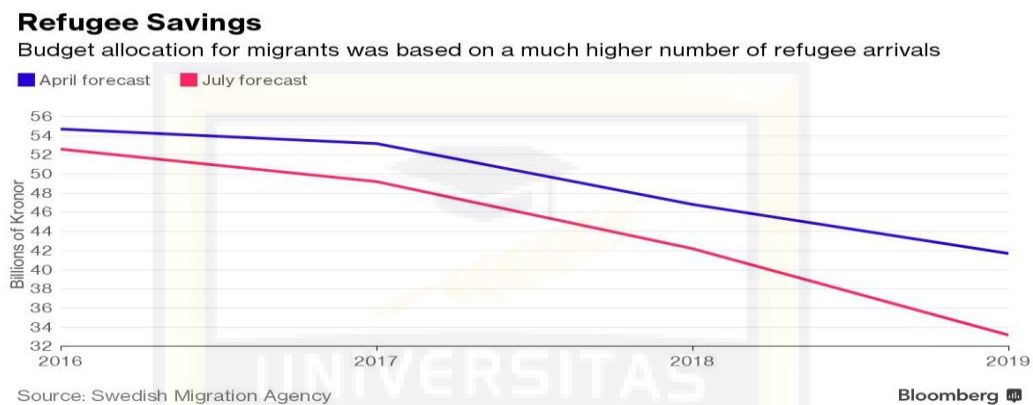


Sumber : CEIC Data (Data, 2017)

Bisa terlihat bahwa pada 2016, Swedia menghabiskan sekitar 41 juta SEK (Swedish Krona) untuk mengatasi isu pengungsi. Pada saat itu, Swedia terpaksa menggunakan 60% dana darurat negara dikarenakan budget alokasi pengungsi yang telah dipersiapkan sebelumnya tidak mampu untuk menutupi seluruh pembiayaan. Dan, dari data di atas diperlihatkan pula bagaimana lonjakan dana yang drastis yang hanya berjarak 1 tahun yakni 2015 – 2016. (Bloomberg, 2016) Dengan kata lain, Swedia mengeluarkan ekstra budget untuk mengatasi isu pengungsi di periode ini. Kemudian, terdapat sedikit

penurunan di tahun 2017 meskipun penurunannya tidak berpengaruh banyak. Akan tetapi penurunan ini menandakan bahwa kebijakan *U – turn Policy* telah mulai bekerja sesuai harapan.

Gambar 4.3 Penurunan Alokasi Budget Swedia untuk Pengungsi 2016 - 2019



Sumber : Bloomberg (Bloomberg, 2016)

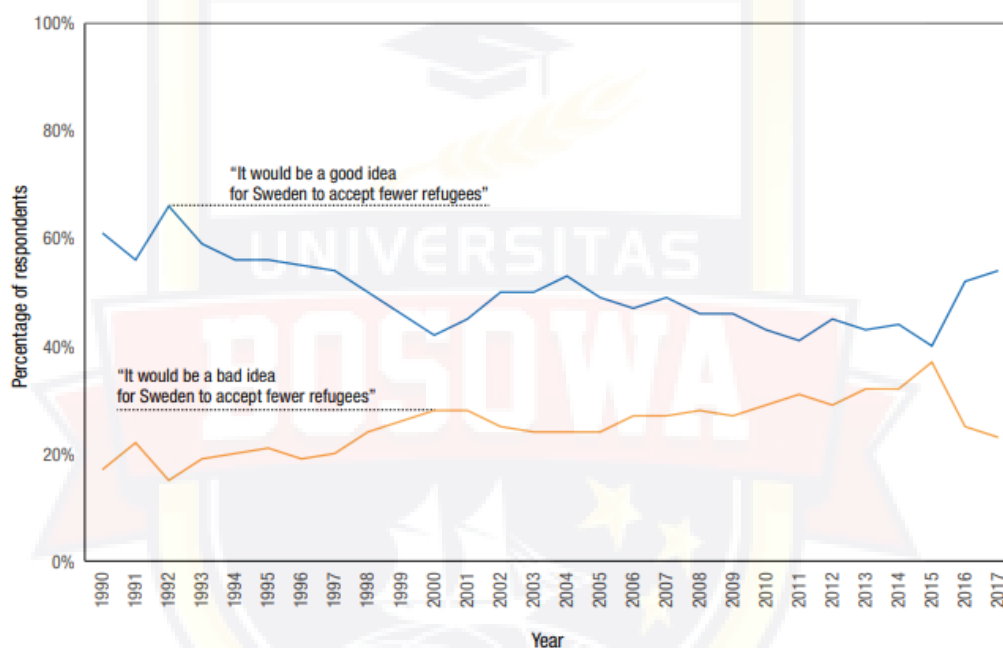
Dimulai dari 2017, budget yang dialokasikan oleh Swedia secara perlahan mulai berkurang seiring dengan menurunnya angka pengungsi yang masuk ke dalam negeri. Dapat terlihat bagaimana alokasi budget dari Swedia terus menurun secara pasti hingga berada di titik paling rendah di tahun 2019. Ini berarti kebijakan *U – turn Policy* berhasil memberikan pengaruh dari segi ekonomi untuk performa alokasi budget yang dipersiapkan oleh pemerintah Swedia untuk menanggulangi isu pengungsi.

2. Pengaruh dari Segi Politik

Selain memberikan pengaruh dari segi ekonomi, *U – turn Policy* juga memberikan dampak pada segi politik. Seperti diketahui bahwa isu pengungsi kerap dijadikan isu oleh oposisi pemerintah untuk menyerang pemerintah. Bahkan Partai Demokrat Swedia yang menjadi pemegang suara pemilu

terbesar di Swedia menunjukkan opini anti pengungsi secara frontal dan hal tersebut didukung oleh sebagian besar masyarakat Swedia. Ketika *U – turn Policy* diberlakukan, terlihat jelas kubu perpolitikan di Swedia terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu pendukung dan kubu penentang kebijakan *U – turn Policy*.

Gambar 4.4 Opini Publik Swedia Terkait Isu Pengungsi



Sumber : Kerry Holloway dan Amy Leach (Leach, 2019)

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kerry Holloway dan Amy Leach dengan judul “*Public Narratives and Attitudes Toward Refugees and other Migrants*” di data tersebut menunjukkan bahwa kubu pendukung *U – turn Policy* terlihat sangat dominan jika dibandingkan dengan kubu penentang kebijakan ini. Kubu pendukung *U – turn Policy* memiliki persentasi 60% di mana rata – rata yang datang dari kubu ini merupakan simpatisan dari Partai Demokrat Swedia. Kubu pendukung ini

beralasan bahwa gelombang masuk pengungsi di tahun 2015 menjadi inti masalah domestik di Swedia. Menurut mereka, pengungsi sangat erat kaitannya dengan naiknya tingkat kriminalitas, kemiskinan hingga kemakmuran. Selain itu pula, dengan adanya banyaknya dukungan terhadap kebijakan *U – turn Policy* yang dikeluarkan oleh pemerintah berarti sebagian besar publik Swedia pun tidak menginginkan kehadiran pengungsi yang jauh lebih banyak lagi. (Leach, 2019)

Sementara itu, kubu penentang *U – turn Policy* yang berjumlah hanya 20% rata – rata merupakan pendukung Partai Moderat Swedia yang sejak awal kontra dengan keputusan pemerintah untuk membatasi kuota masuk para pengungsi. Partai Moderat Swedia bahkan pernah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pemulangan secara paksa 9.000 anak – anak pengungsi dari Swedia akibat pemberlakuan *U – turn Policy*. Akan tetapi, pengadilan tinggi Swedia pun tidak meloloskan hal ini dikarenakan masifnya protes dari kubu pendukung kebijakan ini. Partai Moderat Swedia dapat dikatakan tidak sepenuhnya menentang *U – turn Policy*. (Reuters, 2018)

Mereka menerima kebijakan ini jika disertai dengan solusi. Mereka berpendapat jika memang Swedia memang ingin membatasi kuota masuk pengungsi, pemerintah seharusnya mengalihkan pengungsi – pengungsi ini ke negara lain yang jauh lebih aman seperti Denmark dan Jerman. Bukan malah membiarkan pengungsi ini terlantar. Tindakan ini sama saja dengan melanggar HAM yang selama ini dianut oleh Swedia. (Radio, 2017)

Akan tetapi, dominasi kubu pendukung *U – turn Policy* sangat kuat di Swedia. Mereka pun menentang argumen Partai Moderat Swedia dengan mengutarakan bahwa untuk mengatasi isu pengungsi merupakan kewajiban Uni Eropa. Jika Swedia tidak menginginkan pengungsi, maka itu merupakan hak Swedia. Tidak ada yang bisa memaksakan hal ini. Seharusnya isu gelombang pengungsi ini menjadi tanggung jawab Uni Eropa. Uni Eropa – lah yang harus bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari lonjakan gelombang pengungsi bukan Swedia. (The Guardian, 2018)

Dominasi kubu pendukung *U – turn Policy* ini menjadi bukti keberhasilan Partai Demokrat Swedia dalam mengolah isu pengungsi. Bahkan partai ini mampu mengambil suara dari publik dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak terlalu mengerti akan politik serta isu pengungsi. Keberhasilan Partai Demokrat Swedia ini juga diikuti gelombang protes dalam negeri serta tingginya stigma anti pengungsi di kalangan publik Swedia sehingga memaksa pemerintah segera memberlakukan *U – turn Policy*.

B. Pengaruh *U – turn Policy* untuk Stabilitas Keamanan Kawasan Eropa

1. Memaksa Uni Eropa untuk Mencari Patner Kerja Sama

Ketika *U – turn Policy* diberlakukan pada 2016, Uni Eropa menjadi salah satu pihak yang terkena dampak dari kebijakan ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya kebijakan ini bertumpu pada adanya pembatasan gelombang pengungsi yang masuk atau sedang berada di Swedia. Padahal gelombang pengungsi di rentang waktu 2015 hingga 2016 menjadi titik tertinggi pengungsi dari luar Eropa. Bahkan negara – negara lain yang

biasanya terbuka akan kedatangan pengungsi pun mulai mengeluhkan besarnya angka pengungsi yang harus negara mereka tanggung. Kebijakan *U – turn Policy* ini membuat Uni Eropa terpaksa memutar otak mencari solusi baru guna menggantikan peran Swedia sebagai negara penerima pengungsi. Akibat adanya kebijakan ini membuat Uni Eropa harus menjalankan kerja sama dengan negara lain di luar keanggotaan Uni Eropa, yakni Turki.

Turki sejauh ini belum menjadi anggota Uni Eropa meskipun permintaan untuk masuk keanggotaan telah dilakukan oleh Turki sejak 1987. Dan, Uni Eropa pun menunjukkan ketertarikan dengan mengangkat Turki menjadi negara kandidat di tahun 1999 pada *Helsinki Summit*. Negosiasi masuknya Turki ke Uni Eropa pun telah dilakukan pada 3 Oktober 2005, akan tetapi hingga sekarang proses Turki untuk masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa mengalami stagnansi. Alasan dari hal ini ialah konflik Turki dengan Siprus serta perbedaan kultur dan identitas di mana Turki merupakan negara dengan dominasi penduduk beragama Islam. Sementara sebagian negara Uni Eropa masih tergolong anti terhadap Islam. Akan tetapi meskipun belum masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa, hubungan diplomatik yang terjalin di antara kedua amat harmonis. (Rahim, 2013)

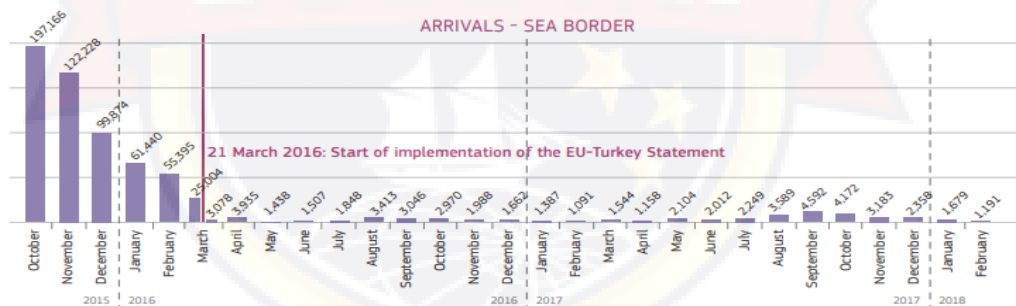
Di tahun 2016, Uni Eropa pun menjalin kerja sama dengan Turki yang diberi nama "*EU – Turkey Statement*" yang mana kerja sama ini sebenarnya telah dibicarakan dari 2015, akan tetapi baru bisa direalisasikan di tahun 2016 bersamaan dengan gelombang protes dari negara – negara anggota Uni Eropa terkait kuota pengungsi tiap negara. (Novrizal Roynanda, 2019) Kesepakatan ini berfokus pada 9 poin kesepakatan, yakni

- a. Semua pengungsi ilegal yang masuk melalui Yunani harus dikembalikan ke Turki. Sementara pengungsi yang masuk dengan menggunakan identitas yang jelas, akan diserahkan ke dalam kewenangan Yunani. Turki berjanji selama proses pengembalian pengungsi ilegal ini akan didampingi oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) sehingga proses pengembalian tersebut akan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Setiap pengungsi Suriah yang masuk ke Eropa akan dibagi dua dengan Turki. Setengahnya akan bermukim di Turki sementara sisanya menetap di Eropa. Proses ini sendiri dilakukan sesuai *UN Vulnerability Criteria*.
- c. Turki akan mengawasi wilayah perbatasan yang kerap menjadi jalan masuk pengungsi ilegal menuju Uni Eropa.
- d. Turki akan memberlakukan *Voluntary Humanitarian Admission Scheme* yang notabene merupakan relokasi pengungsi yang akan dijalankan oleh Turki jika semua pengungsi ilegal berhasil dikumpulkan. Nantinya pengungsi ilegal akan dipindah ke negara – negara yang dipilih oleh Turki.
- e. Turki meminta liberalisasi visa kepada Uni Eropa. Liberalisasi visa sendiri ialah penghapusan kewajiban visa untuk masyarakat Turki yang ingin berkunjung ke Eropa dalam jangka waktu pendek. (Ajansi, 2019)
- f. Mempercepat pemberian dana alokasi senilai 3 miliar Euro yang digunakan untuk memfasilitasi pengungsi dari Eropa ke Turki.
- g. Turki dan Uni Eropa sepakat untuk meningkatkan kerja sama bea cukai dalam kerangka *Custom Unions*

- h. Melalui kerja sama ini, Turki ingin memastikan Uni Eropa serius mempertimbangkan keanggotaan Turki di Uni Eropa
- i. Turki dan Uni Eropa bersama – sama akan meningkatkan kerja sama kemanusiaan yang difokuskan di perbatasan Suriah – Turki. (Council, 2017)

Kerja sama keduanya terbilang berhasil dikarenakan sukses menurunkan angka pengungsi ilegal hingga 97%. Sementara itu angka kematian pengungsi yang meninggal dengan menggunakan jalur laut pun berkurang secara drastis. Uni Eropa pun juga memenuhi permintaan dana dari Turki senilai 3 miliar Euro. (Commission E. , 2018)

Gambar 4.5 Gelombang Masuk Pengungsi ke Eropa Melalui Perbatasan Laut



Sumber : Europe Commission (Commission E. , 2018)

Hal tersebut dapat dilihat dari data di atas di mana jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa melalui jalur laut berkurang sangat drastis. Dengan kata lain, komitmen dari Turki untuk menjaga perbatasan benar – benar dilaksanakan dengan baik. Selain menjalin kerja sama dengan Turki, Uni Eropa juga bekerja sama dengan negara – negara lain di luar Eropa seperti Lebanon dan Yordania.

Kerjasama Uni Eropa dan Lebanon juga dilakukan di tahun yang sama, yakni 2016 dengan nama “*EU – Lebanon Partnership Priorities*”. Lebanon dipilih oleh Uni Eropa menjadi partner kerjasama dikarenakan adanya kedekatan wilayah di antara keduanya. Suriah dan Lebanon dipisahkan oleh perbatasan darat sehingga sangat mudah untuk pengungsi Suriah menuju Lebanon. (Silviana, 2019) Di dalam kerjasama ini, Uni Eropa pun memindahkan sebagian pengungsi yang masuk ke Eropa ke Lebanon. Sama seperti perjanjian dengan Turki, kerjasama Uni Eropa – Lebanon pun berfokus pada 3 poin, antara lain

1. Lebanon dan Uni Eropa sama – sama menghadapi isu kompleks yang sama, yakni terorisme. Untuk mengantisipasi hal ini, Lebanon meminta Uni Eropa untuk memobilisasi sekuritisasi Lebanon dari terorisme dengan memperketat keamanan di perbatasan Lebanon – Suriah, bandara, terminal serta tempat – tempat lainnya.
2. Sebagai gantinya karena telah menampung pengungsi Suriah dari Eropa, Lebanon meminta Uni Eropa untuk bekerjasama mendukung pemerintahan Lebanon dalam sektor administrasi negara, peradilan dan lain – lain.
3. Uni Eropa mengalokasikan dana sebesar 400 juta Euro yang dibayarkan dalam rentang waktu 2016 – 2017 beserta dana tambahan 80 juta Euro. Dana ini digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk para pengungsi serta meningkatkan taraf hidup pengungsi. (European Council, 2016)

Selain Turki dan Lebanon, Uni Eropa juga menggelar kerja sama di tahun 2016, yakni Yordania. Sama seperti dua negara sebelumnya, alasan Uni Eropa menggandeng Yordania dikarenakan adanya kedekatan wilayah dengan Suriah yang menjadi negara dengan pengungsi terbesar. Untuk semakin mempererat kerja sama, Uni Eropa pun memberikan sejumlah penawaran untuk Yordania, yakni

1. Uni Eropa akan membantu segala bentuk aktivitas Yordania yang bertujuan untuk memerangi terorisme
2. Uni Eropa akan membantu proses reformasi ekonomi Yordania
3. Uni Eropa juga akan memberikan bantuan dana senilai 2,1 miliar Euro yang digunakan untuk reformasi ekonomi Yordania serta alokasi pengungsi dari Eropa ke Yordania. (European Council, 2019)

2. Schengen System Menjadi Kacau

Selain membuat Uni Eropa memutar otak dengan mencari patner kerja sama guna mengalihkan pengungsi ke negara di luar Uni Eropa, kehadiran *U – turn Policy* juga mengakibatkan *Schengen System* menjadi kacau.

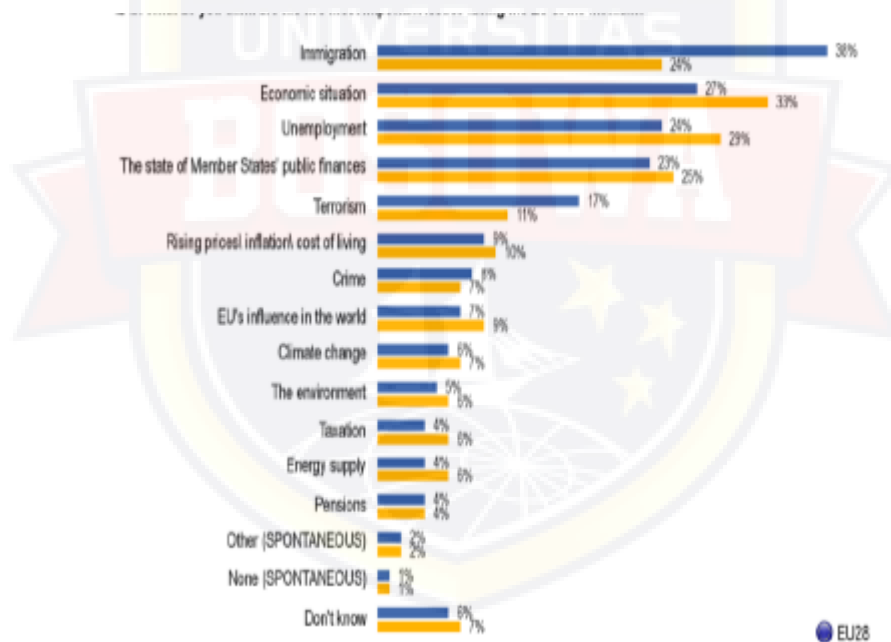
Gambar 4.6 Peta Negara Anggota Schengen System



Sumber : Swedish Presidency of the Council of the European Union (Union S. P., 2019)

Schengen System merupakan kawasan *Schengen* yang termasuk di dalam kawasan istimewa. Dikatakan istimewa dikarenakan kawasan ini menerapkan sistem zona bebas untuk 27 negara yang telah menandatangani kesepakatan di area ini. Inti dari *Schengen System* adalah *free movement* di mana warga negara dari 27 negara tadi dapat bepergian lintas batas tanpa memerlukan visa. Selain untuk memfasilitasi warga negara masing – masing, adanya *Schengen System* juga dimaksudkan untuk memobilisasi gelombang masuk pengunjung. (Commission E.)

Gambar 4.7 Grafik Isu di Eropa



Sumber : European Union (Union E. , 2015)

Imigrasi atau gelombang pengunjung masih menjadi masalah utama di Eropa sehingga adanya *Schengen System* dapat menjadi alternatif untuk memudahkan merelokasi pengunjung dari 1 negara ke negara lain di Eropa tanpa perlu melalui birokrasi yang rumit. Isu gelombang pengunjung berada di

tempat pertama sebagai isu utama yang kerap menemui jalan buntu di Eropa. Isu tersebut memiliki persentase 38% di tahun 2015 di mana angka ini mengalami lonjakan dari 24% di tahun 2015. (Sari, 2017) Hal ini diperparah ketika Swedia yang notabene menjadi satu dari 27 negara di dalam kerja sama *Schengen System* mengeluarkan kebijakan *U – turn Policy* membuat negara – negara lainnya ikut terkena dampak. Swedia membatasi seluruh akses masuk dari Schengen ke Swedia sehingga 26 negara lainnya terpaksa harus memutar otak bagaimana merelokasi gelombang pengungsi yang tidak ingin diterima oleh Swedia. (Sari, 2017)

Schengen System memiliki prinsip *free movement* di mana prinsip ini juga diberlakukan untuk pengungsi. Sebelum tahun 2015, seorang pengungsi yang berada di bawah perlindungan sebuah negara bebas untuk keluar masuk wilayah Schengen dengan syarat negara yang memberikan perlindungan untuk pengungsi tersebut harus termasuk dalam keanggotaan *Schengen System*. Jika telah memenuhi syarat tersebut, maka pengungsi tersebut diberikan waktu tinggal di salah satu negara Schengen System selama 90 hari. Jika pengungsi tersebut ingin tinggal di salah satu negara yang masuk dalam kebijakan Schengen, maka ia diwajibkan mengisi forum aplikasi residensi yang ditujukan untuk negara tersebut. (Commission E.)

Akan tetapi ketika gelombang pengungsi mencapai titik tertinggi pada 2015, beberapa negara yang awalnya sangat terbuka menerima pengungsi seperti Jerman dan Austria mulai membatasi kuota masuk pengungsi. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan *U – turn Policy* yang diberlakukan oleh

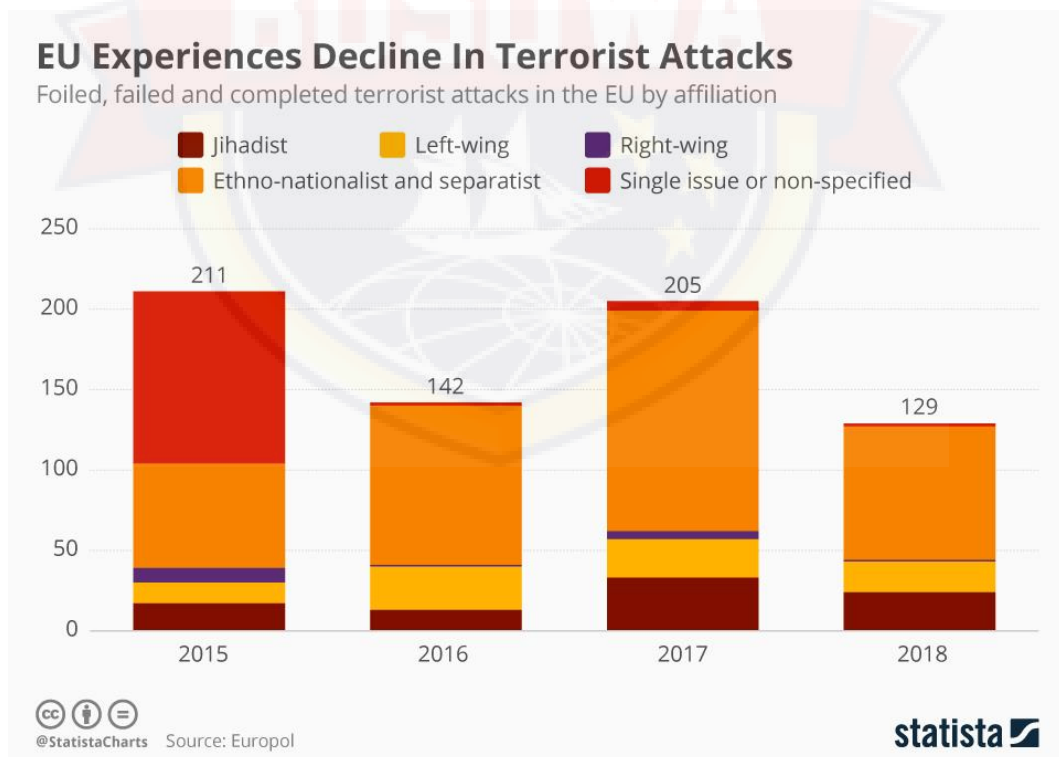
Swedia. Schengen System tidak lagi menerapkan prinsip *free movement* sepenuhnya, area mulai memberlakukan pengecekan berkala di setiap perbatasan selama enam bulan penuh di tahun 2017. Jika dahulunya turis serta pengungsi diberikan kebebasan untuk keluar masuk kawasan Schengen, maka saat *U – turn Policy* diberlakukan oleh Swedia, segala izin untuk pengungsi dihentikan. Pengungsi hanya diperbolehkan melintas di kawasan Schengen jika telah diberikan dari negara terkait. Tak hanya itu, pengungsi juga memerlukan izin lainnya jika ingin keluar dari kawasan Schengen. (Migrants, 2017)

Salah satu kekacauan dari *Schengen System* ialah diberlakukannya *Blue Passport* atau *Blue Pass* oleh Jerman. Pemerintah Jerman hanya mengeluarkan *Blue Pass* untuk pengungsi yang ingin melintas di *Schengen System*. Jelas saja ini sangat menyalahi prinsip *free movement Schengen System*. Jika penulis lihat Jerman pun menyadari jika penerapan *U – turn Policy* oleh Swedia berarti bahwa akan ada banyak sisa gelombang pengungsi yang tidak tertampung yang bisa masuk ke Jerman kapan saja. Untuk itu Jerman pun menerapkan *Blue Pass* untuk mengantisipasi hal ini meskipun tindakan sama saja dengan menghilangkan prinsip *free movement* yang diusung oleh *Schengen System*. (Germany)

Kekacauan lainnya terlihat dari kemunculan *security dilemma* di *Schengen System*. *Security dilemma* sendiri merupakan kondisi di mana sebuah negara mulai meningkatkan tingkat keamanan yang dipicu oleh reaksi negara tetangganya. (Wivel, 2011) Hal ini pun terjadi di *Schengen System*.

Akibat *U – turn Policy* yang diterapkan oleh Swedia membuat negara – negara sekitar kawasan Schengen merasa khawatir jika gelombang pengungsi akan masuk ke negara mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tal Dingott Alkopher dan Emmanuelle Blanc dengan judul “*Schengen Area Shaken : The Impact of Immigration – related Threat Perceptions on European Security Community*”, *security dilemma* ini menyebabkan negara – negara yang tergabung dalam *Schengen System* menjadi ragu untuk meneruskan prinsip *free movement*. (Blanc, 2017) Selain karena beberapa negara telah melakukan pembatasan, isu terorisme masih menjadi ketakutan sendiri untuk negara – negara *Schengen System*.

Gambar 4.8 Serangan Terorisme di Eropa



Sumber : Statista (Statista, 2019)

Isu pengungsi bukan hanya tentang masuknya orang – orang asing ke dalam teritorial sebuah negara, masuknya pengungsi juga berarti masuknya ideologi yang tidak diinginkan seperti terorisme dan radikalisme. Aksi terorisme di Uni Eropa sebagian besar terjadi dikarenakan tingginya angka pengungsi. Bisa terlihat angka terorisme di Uni Eropa yang sangat tinggi di mana angka ini juga diiringi dengan tinggi gelombang pengungsi pada waktu itu. Maka terorisme di tahun 2015 inilah yang membuat negara – negara *Schengen System* merasa perlu untuk ikut melindungi keamanan dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Swedia melalui *U – turn Policy*.

3. Timbulnya Asymmetrical Burden Sharing

Asymmetrical Burden Sharing (ABS) diartikan sebagai kondisi di mana adanya pembagian beban yang tidak rata yang harus ditanggung oleh sebuah negara. ABS ini muncul dikarenakan adanya *unfortune* dan *fortune country*. *Unfortunate country* merujuk kepada negara yang “terpaksa” menanggung beban yang “dirasa” jauh lebih banyak sementara *fortune country* merupakan kebalikannya di mana negara tersebut merasa jauh menanggung beban yang jauh lebih ringan. Berat atau ringannya sebuah beban tergantung pada kemampuan yang dirasakan oleh masing – masing negara. Maka dari adanya perasaan terpaksa dan keberatan, akan muncul rasa cemburu *unfortune country* terhadap *fortune country*. Kondisi semacam ini yang akan menyebabkan timbulnya ABS. (Benedikter, 2018)

Hal ini pun terjadi di Uni Eropa. Jika di dua poin sebelumnya, penulis memaparkan terkait bagaimana pengaruh *U – turn Policy* terhadap stabilitas

keamanan kawasan Uni Eropa maka di poin ini penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana stabilitas kinerja negara – negara anggota Uni Eropa sebagai satu tim karena tidak bisa dipungkiri, jika kinerja negara – negara anggota menurun, akan berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas keamanan kawasan. Penyebab utama timbulnya ABS di dalam tubuh Uni Eropa dimulai dari adanya sistem *Council Decision* 1523. Seperti disebutkan sebelumnya bahwasanya kebijakan ini berfokus pada pembagian kuota pengungsi ke seluruh negara – negara anggota Uni Eropa sesuai dengan kemampuan dan kemakmuran negara – negara tersebut.

Berdasarkan tulisan dengan judul “*Burden Sharing in the Field of Asylum : Legal Motivations and Implications of Regional Approach*” oleh Segolene Barbou Des Places yang memaparkan alasan mengapa Uni Eropa menerapkan kebijakan ini ialah pertama, untuk meningkatkan solidaritas kerja sama antar negara anggota. Uni Eropa ingin memastikan bahwa beban kuota pengungsi ini tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja, tetapi oleh seluruh negara anggota. Kedua, untuk meringankan beban finansial. Untuk menampung pengungsi pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu jika seluruh negara anggota juga ikut menerapkan kebijakan sama maka akan sangat meringankan biaya finansial. Ketiga, kebijakan pembagian kuota merupakan sebuah mekanisme yang akan memberikan kemudahan untuk setiap negara untuk memprediksi solusi yang akan dilakukan jika gelombang pengungsi kembali naik di masa yang akan datang. (Places, 2012)

Tapi kenyataan, kebijakan ini justru menjadi bumerang untuk kerja sama di Uni Eropa. Tidak ada yang memprediksi bahwa salah satu negara penampung kuota pengungsi terbanyak di Eropa, yakni Swedia akan memberlakukan *U – turn Policy*. Swedia seolah lepas tangan dan membiarkan lonjakan gelombang pengungsi di 2016 ditanggung oleh negara – negara Uni Eropa lainnya. Hal ini mengakibatkan Uni Eropa terpaksa membagi kuota milik Swedia ke negara lainnya dan tentu saja hal tersebut mendapat pertentangan dari negara – negara lainnya. Pada momen ini, solidaritas antar anggota pun menjadi kacau. Jerman pun melakukan hal yang sama dengan Swedia yaitu dengan menerbitkan *Blue Pass*. (Germany)

Negara – negara dari Eropa Timur seperti Italia, Yunani dan Hungaria bahkan melakukan hal ekstrim dengan membangun tembok perbatasan yang menjadi jalur masuknya pengungsi ke dalam negeri. (The Guardian, 2020) Polandia pun juga ikut melakukan pembatasan. Polandia menolak setiap pengungsi yang mencari suaka. Tidak hanya itu, Polandia juga menolak kebijakan pembagian pembagian kuota yang diusung oleh Uni Eropa. Meskipun negaranya sendiri tergolong mampu, tapi pengungsi hanya akan memberikan masalah baru seperti isu terorisme, kriminalitas, kemiskinan dan lain – lain. Polandia merasa pembagian kuota bukan merupakan bentuk sebuah solidaritas. Seharusnya kebijakan itu dilakukan atas dasar kemauan negara yang bersangkutan. (Amelia, 2022) Austria tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga menempatkan pasukan militer di perbatasannya guna mencegah pengungsi. Austria yang selama ini menjadi negara yang tergolong

mampu menerima pengungsi pun menyatakan keberatannya terhadap kebijakan pembagian kuota. (DW, 2016)

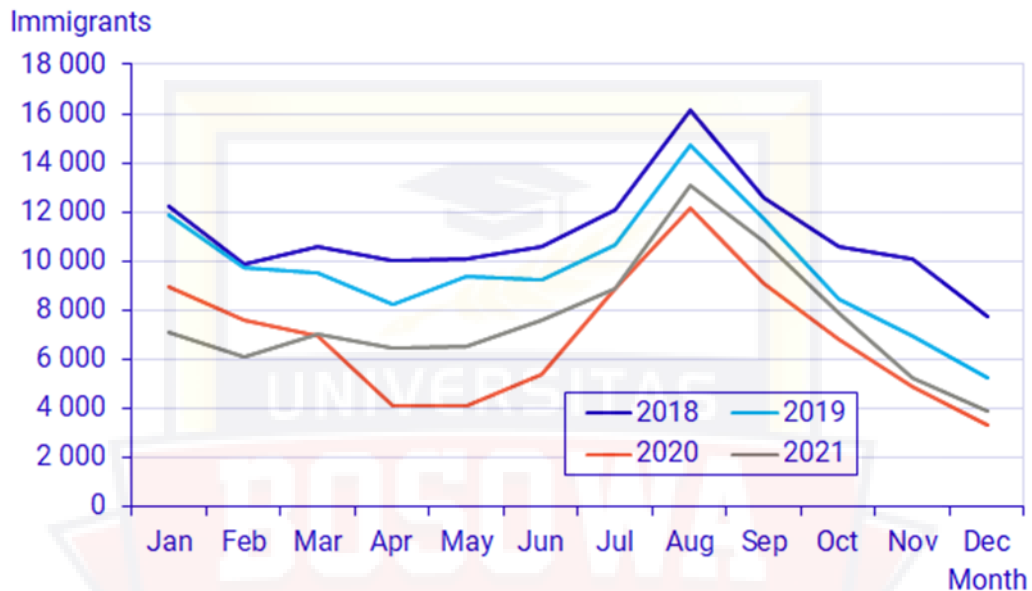
Penulis dapat simpulkan bahwa *U – turn Policy* bukan menjadi satu – satunya pemicu timbulnya ABS di dalam Uni Eropa, akan tetapi kebijakan pembagian kuota sendirilah yang disinyalir sudah tidak mampu ditampung oleh negara – negara anggota. Terlihat jelas bahwa setiap negara ingin menyelamatkan dirinya sendirinya sehingga solidaritas yang selama ini diusung oleh Uni Eropa pun mulai menghilang maka dari itu Uni Eropa harus memutar otak mencari solusi dengan mengandalkan bantuan pihak di luar Eropa, seperti Turki, Lebanon dan Yordania yang telah penulis paparkan di poin pertama.

Setelah memaparkan satu persatu poin terkait bagaimana pengaruh *U – turn Policy* yang diterapkan oleh Swedia terhadap stabilitas keamanan kawasan Eropa, penulis akan menganalisa dua hal penting di dalam penelitian, yaitu bagaimana keberhasilan *U – turn Policy* dalam menyelesaikan isu pengungsi Swedia serta bagaimana peforma solusi yang dijalankan untuk Uni Eropa untuk menangani pengaruh *U – turn Policy* dari Swedia. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwasanya penggunaan *U – turn Policy* oleh Swedia ditujukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi serta perpecahan politik yang timbul di Swedia.

Dari rentang waktu 2017 hingga 2019, terlihat di sub bab 4.1.1 bahwa *U – turn Policy* berhasil menurunkan budget alokasi pengungsi di Swedia secara drastis. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa adanya sebuah

keberhasilan dari penerapan kebijakan ini. Di 2019 – 2020, penulis akan menghubungkan bagaimana peforma kebijakan ini menghadap pandemi Covid – 19 yang melanda dunia di tahun 2020.

Gambar 4.9 Gelombang Pengungsi di Swedia 2018 - 2021



Sumber : Statistic Sweden (Sweden, 2022)

Jika melihat data di atas terlihat bahwasanya tahun 2020 menjadi titik terendah untuk masuknya gelombang pengungsi di Swedia. Penulis menilai hal ini cukup beralasan dikarenakan Covid – 19 mulai memasuki Swedia sekitar awal Januari 2020. Pada saat itu, Swedia masih menerapkan *U – turn Policy* untuk menangani isu pengungsi. Pemerintah Swedia menuturkan bahwa *U – turn Policy* masih akan tetap digunakan selama kuota pengungsi sudah masuk ke dalam tahap “bisa dikendalikan”. (Forbes, 2020) Ketika Covid – 19 mulai memasuki Swedia, pemerintah pun memberlakukan pembatasan bepergian baik itu untuk yang keluar atau masuk ke Swedia. Dan, hal ini secara langsung berdampak pada pengungsi. (Forbes, 2020)

Dengan kata lain, saat itu Swedia menerapkan dua kebijakan pembatasan, yakni U – turn Policy dan kebijakan Covid – 19. Alasan inilah yang membuat gelombang masuk pengungsi pada 2020 menjadi jumlah paling sedikit di dalam sejarah Swedia. Menurut AIDA (*The Asylum Information Database*), jumlah pengungsi yang masuk ke Swedia berkurang sangat drastis yang awalnya 21.984 di 2019 menjadi 12.991 di tahun 2020. Meskipun telah mampu menurunkan angka pengungsi tahun 2020, akan tetapi kenyataannya kondisi pengungsi pada saat pandemi di Swedia tidak jauh lebih baik. (AIDA, 2020)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mangrio Elisabeth dkk dengan judul “*Refugees in Sweden During the Covid – 19 Pandemic – The Need for a New Perspective on Health and Integration*” memaparkan kelompok pengungsi kerap mengalami keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan di masa pandemi. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki data – data diri yang mendukung serta ditambah tidak bisa berbahasa Swedia sehingga menjadikan kelompok pengungsi sebagai subjek yang rentan dalam menyebarkan virus Covid – 19. Hal ini diperparah dengan sentimen negatif masyarakat lokal yang membuat pengungsi takut untuk mengakses fasilitas kesehatan di ruang publik. Pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk mencari jalan keluar dari hal ini. Akan tetapi meskipun telah berhasil menurunkan angka pengungsi secara drastis, isu pengungsi masih kerap memunculkan debat. (Mangrio Elisabeth, 2020)

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Jesper Bengtsson dengan judul “*Sweden’s Never - Ending Debate in Migration*” menuturkan pemerintah berupaya untuk menerbitkan kebijakan migrasi baru pada Agustus 2020 di mana kebijakan ini nantinya akan menggantikan kebijakan *U – turn Policy* yang dinyatakan sukses menurunkan angka pengungsi. Tetapi, wacana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra yang membuat pemerintah terpaksa untuk membatalkan kebijakan ini. Artikel ini lalu menambahkan bahwa *U – turn Policy* tidak mampu untuk mengurangi debat sama sekali. Ini berarti suara masyarakat serta oposisi memang menginginkan pengungsi untuk keluar dari Swedia tanpa syarat apapun. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk tidak memberikan jaminan apapun kepada pengungsi yang ingin memasuki Swedia. Pemerintah lebih memberikan rekomendasi bagi para pengungsi untuk meninggalkan Swedia dengan cara aman. (Stiftung, 2020)

Jika penulis simpulkan dari hasil analisa di atas ialah *U – turn Policy* memang berhasil menurunkan angka pengungsi akan tetapi proses penerapan kebijakan ini tidak sepenuhnya mampu memanusiaikan pengungsi di saat pandemi. Ditambah suara oposisi serta kubu yang menolak pengungsi masih terlalu dominan sehingga meski pandemi telah berakhir, *U – turn Policy* tetap diberlakukan. Penulis melihat adanya ketidakmampuan pemerintah untuk meredakan perdebatan dalam negeri sehingga cenderung mengambil jalan untuk memuaskan kelompok dengan suara paling dominan. Seperti yang penulis katakan bahwasanya *U – turn Policy* akan digunakan selama kuota pengungsi “bisa dikendalikan”, wacana ini tidak akan pernah berlaku.

Walaupun kuota pengungsi di Swedia telah “bisa dikendalikan” tetapi pemerintah masih belum menemukan jalan keluar untuk menghentikan perdebatan, *U – turn Policy* akan terus diberlakukan.

Setelah menganalisa bagaimana kelanjutan keberhasilan *U – turn Policy* bagi penanganan isu pengungsi di Swedia, penulis akan melanjutkan dengan bagaimana performa solusi yang dijalankan oleh Uni Eropa untuk menangani isu pengungsi pasca pemberlakuan *U – turn Policy* oleh Swedia. Seperti yang diketahui bahwa pasca Swedia melakukan pembatasan, maka timbul ABS di antara negara – negara anggota Uni Eropa. ABS ini terlihat dari tindakan sebagian negara anggota Uni Eropa yang turut melakukan pembatasan sehingga membuat Uni Eropa harus mencari bantuan dari luar Eropa seperti menjalin kerja sama dengan negara lain seperti Turki, Lebanon dan Yordania.

Gambar 4.10 Perbandingan Pengungsi di Eropa pada 2019 dan 2020

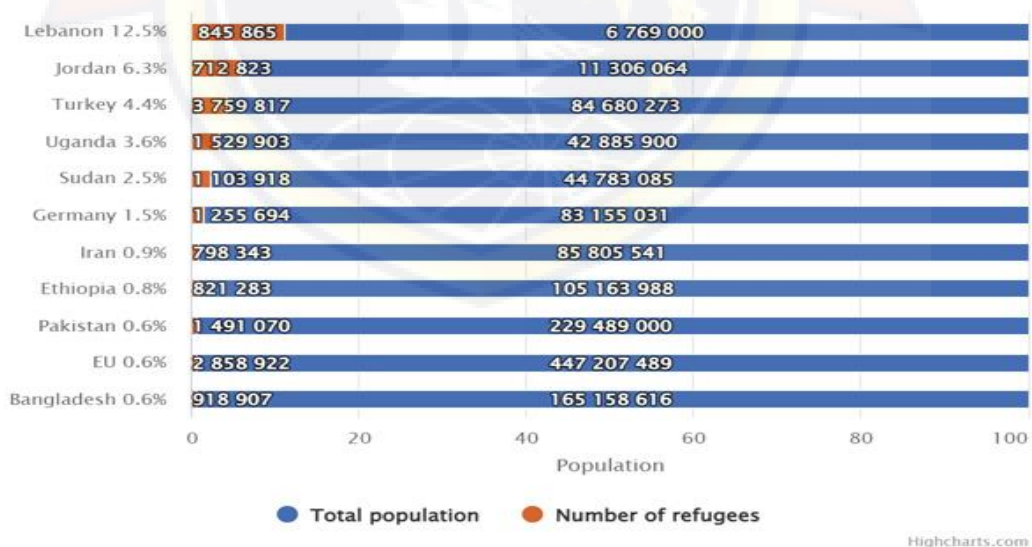


Sumber : Europe Perceptions (Perceptions, 2020)

Di atas merupakan perbandingan jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa pada 2019 dan 2020. Bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah

yang masuk yang meskipun tidak terlalu signifikan akan tetapi terdapat penurunan pengungsi di tahun 2020. Bulan April 2020 menjadi titik terendah masuknya pengungsi dikarenakan pada saat itu, negara – negara di Eropa tengah berfokus pada pembatasan aktivitas akibat penyebaran Covid – 19. Di bulan Mei hingga Desember angka pengungsi kembali naik tetapi tidak terlalu tinggi seperti di tahun sebelumnya. Jerman, Prancis dan Spanyol menjadi tiga negara terbesar yang menampung gelombang pengungsi di Eropa. (Perceptions, 2020) Berdasarkan laporan dari EUAA (*European Union Agency for Asylum*) pada 2020, Jerman menerima sekitar 122.000, Prancis di angka 93.000 dan Spanyol kedatangan 89.000 jiwa. Angka – angka ini mengalami penurunan dari kedatangan pengungsi di tahun 2019. (EUAA, 2020)

Gambar 4.11 Negara – negara Penerima Pengungsi Tertinggi di Dunia



Sumber : Highchart (Bleta, 2023)

Meskipun masih terus kedatangan pengungsi, tapi penulis tetapkan bahwa solusi yang dilakukan oleh Uni Eropa, yakni mencari patner kerja sama di luar Eropa terbilang sangat sukses. Hal ini dibuktikan dengan data di atas di mana Jerman yang menjadi penampung pengungsi terbesar di Eropa justru berada di tempat keenam sebagai negara dengan populasi pengungsi terbesar. Dan uniknya tiga negara teratas seperti Lebanon, Turki dan Yordania justru merupakan patner kerja inti Uni Eropa dalam hal penanganan isu pengungsi. Ini berarti dengan mengalihkan pengungsi dari Eropa ke tiga negara tersebut, beban dari Eropa berhasil diredakan.

Data ini juga membuktikan bahwa *U – turn Policy* memang memberikan pengaruh dalam instabilitas keamanan kawasan Eropa seperti kacaunya Schengen System dan merosotnya solidaritas antar negara anggota, akan tetapi pengaruh tersebut hanya terjadi di awal penerapan kebijakan. Dan ketika memasuki tahun 2019 dan 2020, Uni Eropa telah berhasil menstabilkan keamanan kawasan akibat isu pengungsi. Penulis juga melihat bahwa kesuksesan solusi yang diambil oleh Uni Eropa tidak semata – mata terjadi karena kerja sama dengan Turki, Lebanon dan Yordania, tetapi juga karena adanya pandemi Covid – 19 yang menyebar di Eropa sehingga angka pengungsi yang masuk pun rendah.

BAB IV

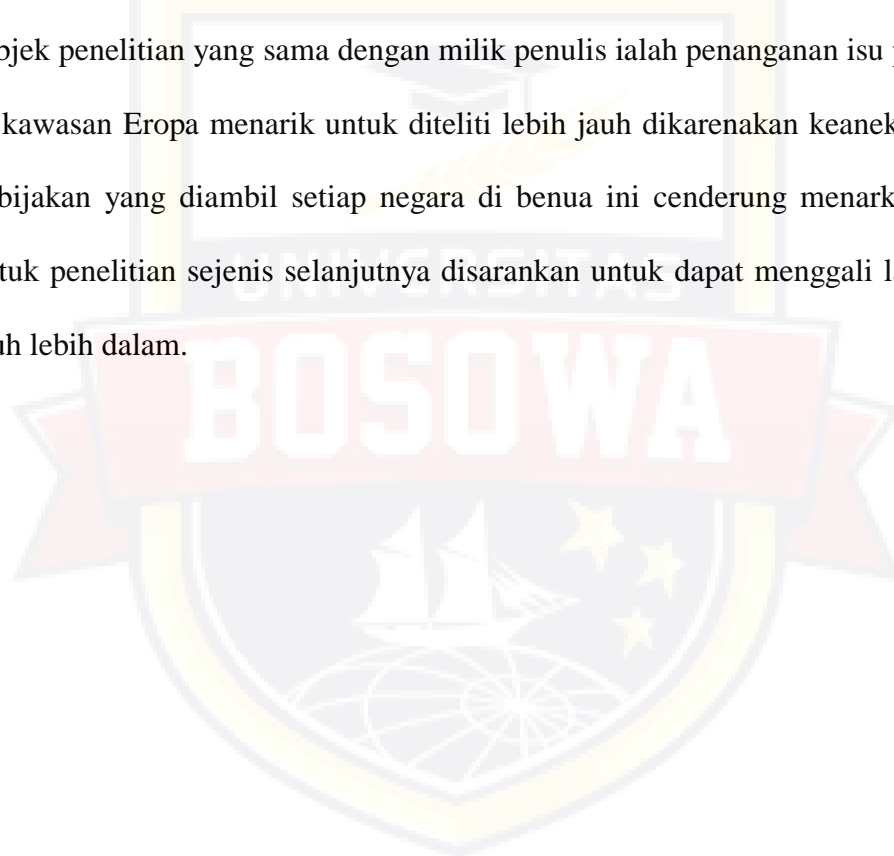
KESIMPULAN

Pada 2015, gelombang pengungsi di Eropa berada pada titik tertinggi sehingga membuat Uni Eropa memberlakukan kebijakan *Council Decision 1523* di mana kebijakan ini berfokus pada pembagian kuota sesuai dengan kemampuan dan kemakmuran negara anggota. Akan tetapi Swedia yang dikenal sebagai negara yang sangat terbuka dengan pengungsi malah memberlakukan *U – turn Policy*. *U – turn Policy* merupakan kebijakan pembatasan pengungsi yang masuk ke Swedia. Kebijakan ini pun berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Swedia dan kawasan Eropa. Untuk Swedia, *U – turn Policy* berhasil memberikan pengaruh yang baik untuk pengurangan budget tahunan pemerintah Swedia. Akan tetapi *U – turn Policy* juga menimbulkan perdebatan untuk kubu anti pengungsi dan pendukung pengungsi.

Untuk stabilitas kawasan Eropa sendiri, *U – turn Policy* berpengaruh terhadap tiga poin antara (1) kebijakan ini memaksa Uni Eropa untuk menjalin kerja sama di luar Eropa seperti Turki, Lebanon dan Yordania. (2) Kacaunya *Schengen System* di mana kawasan Schengen merupakan kawasan yang mendukung prinsip *free movement* untuk 27 negara yang telah menyepakati sistem ini termasuk Swedia. Akibat *U – turn Policy*, Swedia turut melakukan pembatasan di perbatasan Schengen yang kemudian juga diikuti oleh negara anggota lainnya. Akhirnya, timbullah security dilemma di kawasan ini. (3) Kemunculan ABS (*Asymmetrical Burden Sharing*) yakni merosotnya solidaritas antar negara akibat adanya kecemburuan satu sama lain. Dikarenakan *U – turn*

Policy, kuota pengungsi untuk Swedia harus diserahkan ke negara lainnya. Hal ini menimbulkan kecemburuan dikarenakan muncul perasaan akan perlakuan tidak adil dari pembagian kuota ini. Hal ini kemudian berpengaruh pada solidaritas antar negara di mana setiap negara mulai ingin menyelamatkan diri sendiri dengan ikut melakukan pembatasan terhadap gelombang pengungsi.

Saran penulis untuk penelitian yang akan datang yang juga mengambil subjek penelitian yang sama dengan milik penulis ialah penanganan isu pengungsi di kawasan Eropa menarik untuk diteliti lebih jauh dikarenakan keanekaragaman kebijakan yang diambil setiap negara di benua ini cenderung menarik sehingga untuk penelitian sejenis selanjutnya disarankan untuk dapat menggali lagi isu ini jauh lebih dalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, J. (2020). THE THEORETICAL SIGNIFICANCE OF FOREIGN POLICY IN INTERNATIONAL RELATIONS-AN ANALYSES. *Journal of Critical Reviews*, 788.
- AIDA. (2020). *Country Report : Sweden*.
- AIDA. (2021). Retrieved from Applications and granting of protection status at first instance: 2021: <https://asylumineurope.org/reports/country/sweden/statistics/>
- Ajansi, A. (2019). Retrieved from Turki percepat proses liberalisasi visa Uni Eropa: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-percepat-proses-liberalisasi-visa-uni-eropa/1586887>
- Amelia, S. (2022). Standar Ganda Polandia Terhadap Pengungsi dalam Kerangka Keamanan: Studi Kasus Krisis Pengungsi Tahun 2015 dan 2022.
- Benedikter, I. P. (2018). Europe's refugee and migrant crisis Political responses to asymmetrical pressures. *Dans Politique européenne* .
- Benkova, L. (2017). Retrieved from Europe's Response to the Migration Crisis. : https://www.aies.at/download/2017/AIES-Fokus_2017-03.pdf
- Blanc, T. D. (2017). Schengen Area Shaken : The Impact of Immigration – related Threat Perceptions on European Security Community. *Journal of International Relations and Development*.
- Bleta, E. S. (2023). Retrieved from Refugees: how many manage to come to the European Union?: <https://pro-ide.fr/en/refugees-how-many-manage-to-come-to-the-european-union/>
- Bloomberg. (2016). Retrieved from From Budget Shock to Surplus: Sweden's Handling the Refugee Boom: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-11/sweden-s-handling-of-migrants-shows-positives-of-fiscal-stimulus#xj4y7vzkg>
- Commission, E. (n.d.). Retrieved from Schengen Area: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en
- Commission, E. (2018). Retrieved from EU-TURKEY STATEMENT: https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-09/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf
- Council, E. (2017). *EU-Turkey statement*. European Council.

- Data, C. (2017). Retrieved from Sweden Central Govt Budget: Expenditure: EA: Immigrants and Refugees: <https://www.ceicdata.com/en/sweden/central-government-budget/central-govt-budget-expenditure-ea-immigrants-and-refugees#:~:text=Financial%20Management%20Authority-,Sweden%20Central%20Govt%20Budget%3A%20Expenditure%3A%20EA%3A%20Immigrants%20and%20Refugees,>
- DW. (2016). Retrieved from Austria asylum laws get tougher: <https://www.dw.com/en/austria-passes-tougher-asylum-law-to-restrict-refugees/a-19218817>
- Emilsson, H. (2018). Continuity or Change? the Refugee Crisis and the End of Swedish Exceptionalism. *MIM WORKING PAPER SERIES 18: 3*.
- Eroukhmanoff, C. (2018). Securitisation Theory : An Introduction. .
- EUAA. (2020). Retrieved from Asylum Trends – 2020 Overview: <https://euaa.europa.eu/asylum-trends-2020-overview>
- European Council. (2016). Retrieved from EU and Lebanon adopt partnership priorities and compact: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/15/eu-lebanon-partnership/>
- European Council. (2019). Retrieved from Report on EU - Jordan relations in the framework of the revised European Neighbourhood Policy (June 2018 - April 2019): <https://reliefweb.int/report/jordan/report-eu-jordan-relations-framework-revised-european-neighbourhood-policy-june-2018>
- Europol. (2017). Retrieved from European Union Terrorism Situation and Trend Report. : <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017>
- Forbes. (2020). Retrieved from Sweden Has A Problem Sending Asylum Seekers Back: <https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2020/02/11/sweden-has-a-problem-sending-asylum-seekers-back/?sh=60fde67c1d36>
- Germany, H. (n.d.). Retrieved from Blue Passport: <https://handbookgermany.de/en/blue-passport>
- Guardian, T. (2015). Retrieved from Sweden slams shut its open-door policy towards refugees: <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/24/sweden-asylum-seekers-refugees-policy-reversal>
- Hariati, S. &. (2017). *Penolakan Negara - negara Uni Eropa terhadap Kebijakan Kuota Pengungsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Herindrasti, V. S. (2021). Krisis Pengungsi Eropa 2014 – 2015. . *Jurnal Universitas Kristen Indonesia*. .
- Hikmawati, D. (2022). *Kebijakan Luar Negeri Swedia terhadap Imigran di Eropa pada tahun 2015 – 2019*. Universitas Nasional.
- Institute, M. P. (2018). Retrieved from Sweden: By Turns Welcoming and Restrictive in its Immigration Policy: <https://www.migrationpolicy.org/article/sweden-turns-welcoming-and-restrictive-its-immigration-policy>
- Juliandini, N. (2021). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Swedia Terhadap Pengungsi Suriah Periode 2015-2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kaupmees, A. (2015). Retrieved from Sweden Struggles With an Influx of Refugees: <https://icds.ee/en/sweden-struggles-with-an-influx-of-refugees/>
- Leach, K. H. (2019). Public Narratives and Attitudes Toward Refugees and other Migrants. *ODI Production*.
- Mangrio Elisabeth, P. -S. (2020). Refugees in Sweden During the Covid – 19 Pandemic – The Need for a New Perspective on Health and Integration. *Front. Public Health Volume 8*.
- Migrants, I. (2017). Retrieved from What is the Schengen area and how does it impact refugees?: <https://www.infomigrants.net/en/post/5791/what-is-the-schengen-area-and-how-does-it-impact-refugees>
- Mike Berry, I. G.–B. (2015). Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in EU : A Content Analysis of Five European Countries. . *Journal of Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies*. .
- Novrizal Roynanda. (2019). *KEBIJAKAN UNI EROPA TERHADAP KRISIS PENGUNGI: ANALISIS SEKURITISASI DALAM PEMBENTUKAN EU-TURKEY STATEMENT*. Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Parusel, B. (2016). Retrieved from Sweden’s U – turn on Asylum. : <https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/solutions/parusel.pdf>
- Pawesthri, A. R. (2019). *Dampak Sekuritisasi Politik Konflik Darfur, Sudan terhadap Keamanan Masyarakat dan Stabilitas Regional*. Universitas Katolik Parahyangan.

- Perceptions, E. (2020). Retrieved from Current Migration Trends in and within Europe: <https://www.perceptions.eu/current-migration-trends-in-and-within-europe-2/>
- Places, S. B. (2012). Burden Sharing in the Field of Asylum : Legal Motivations and Implications of Regional Approach. *Hal Science*.
- Pratiwi, T. S. (2019). The Dynamics of Swedish Migration Policy on Refugees 1. *International Conference on Humanity Issues Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Radio, S. (2017). Retrieved from Moderate Party adopts tougher policies on migration: <https://sverigesradio.se/artikel/6799151>
- Rahim, F. (2013). Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Global & Policy Vol.1, No.2*.
- Ranaldi, V. (2016). *Refugees and National Security in the European Continent: Individual and Integrated Strategies*. University of Rome.
- Refugees, T. P. (2016). *PUBLIC PERCEPTIONS OF THE REFUGEE CRISIS: PHASE II QUALITATIVE INSIGHT FOR SWEDEN*. TENT.
- Reuters. (2018). Retrieved from Swedish parliament votes to give asylum seekers second chance, exposing divisions: <https://www.reuters.com/article/uk-sweden-politics-idUKKCN1J329R>
- Royanda, N. (2019). *Kebijakan Uni Eropa terhadap Krisis Pengungsi : Analisis Sekuritisasi dalam Pembentukan EU – Turkey Statement*. . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Safitri, R. (2017). *Sikap Uni Eropa dalam Menghadapi Perbedaan Respon Negara Anggota Terkait Krisis Migran 2011 – 2016*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Salsabila, S. (2018). Reorientasi Kebijakan Migrasi Terbuka dalam Sistem Negara Kesejahteraan Swedia pada Masa Krisis Migran Eropa Tahun 2015. *Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3*.
- Sari, P. N. (2017). Dampak Kebijakan Schengen Uni Eropa Terhadap Eurocepticism di Nordik. *Global & Policy Vol.5, No.2*.
- Senadeera, M. (2023). Theory and concept foreign policy. *ResearchGate*, 9.
- Sergio Carrera, M. S. (2019). When mobility is not a choice . *CEPS Paper*.
- Silviana, R. (2019). THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN HANDLING SYRIAN REFUGEES. *Lajil Volume 1 Issue 1*.

- Statista. (2019). Retrieved from EU Experiences Decline In Terrorist Attacks: <https://www.statista.com/chart/18544/foiled-failed-and-completed-terrorist-attacks-in-the-eu/>
- Stenström, L. (2022). Retrieved from Migration in Sweden: <https://ememethods.net/target-group-and-countries/migration-in-sweden-2/>
- Stiftung, F. E. (2020). Retrieved from Sweden's Never - Ending Debate in Migration: <https://www.ips-journal.eu/regions/europe/swedens-never-ending-debate-on-migration-4635/>
- Sverige, S. (2022). *Sweden has a long history of migration. Get the bigger picture here.* Sweden Immigration.
- Sweden, S. (2022). Retrieved from Immigration was more affected than emigration: <https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/population/population-projections/demographic-analysis-demog/pong/statistical-news/migration-to-and-from-sweden-during-the-covid19-pandemic/>
- The Guardian. (2018). Retrieved from Anti-migrant feeling fuels Swedish far right as election looms: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/02/sweden-democrats-far-right-anti-migrant>
- The Guardian. (2020). Retrieved from Greece extends wall on Turkish border as refugee row deepens: <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/greece-extends-wall-on-turkish-border-as-refugee-row-deepens>
- Times, F. (2017). Retrieved from Sweden's immigrants struggle with jobs and integration: <https://www.ft.com/content/838d60c2-0961-11e7-97d1-5e720a26771b>
- UNHCR. (2015). *Forced Displacement – Global trends in 2015.* UNHCR.
- Union, E. (2015). Retrieved from Spring 2015 Standard Eurobarometer : Citizens see immigration as top challenge for EU to tackle: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5451
- Union, S. P. (2019). Retrieved from Schengen area– no passport control between countries: <https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/schengen-area-no-passport-control-between-countries/>
- Wivel, A. (2011). *International Encyclopedia of Political Science.* SAGE.

